

Desa sebagai Pusat Pertumbuhan Baru dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia

Oleh

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

www.rudyct.com/cv.pdf

Institut Bisnis dan Multimedia (IBM ASMI)

RudyCT Academic Series 2026



ARTIKEL AKADEMIK

Desa sebagai Pusat Pertumbuhan Baru dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia

Mewujudkan desa yang mandiri, berdaya saing, terhubung, dan sejahtera untuk Indonesia maju.



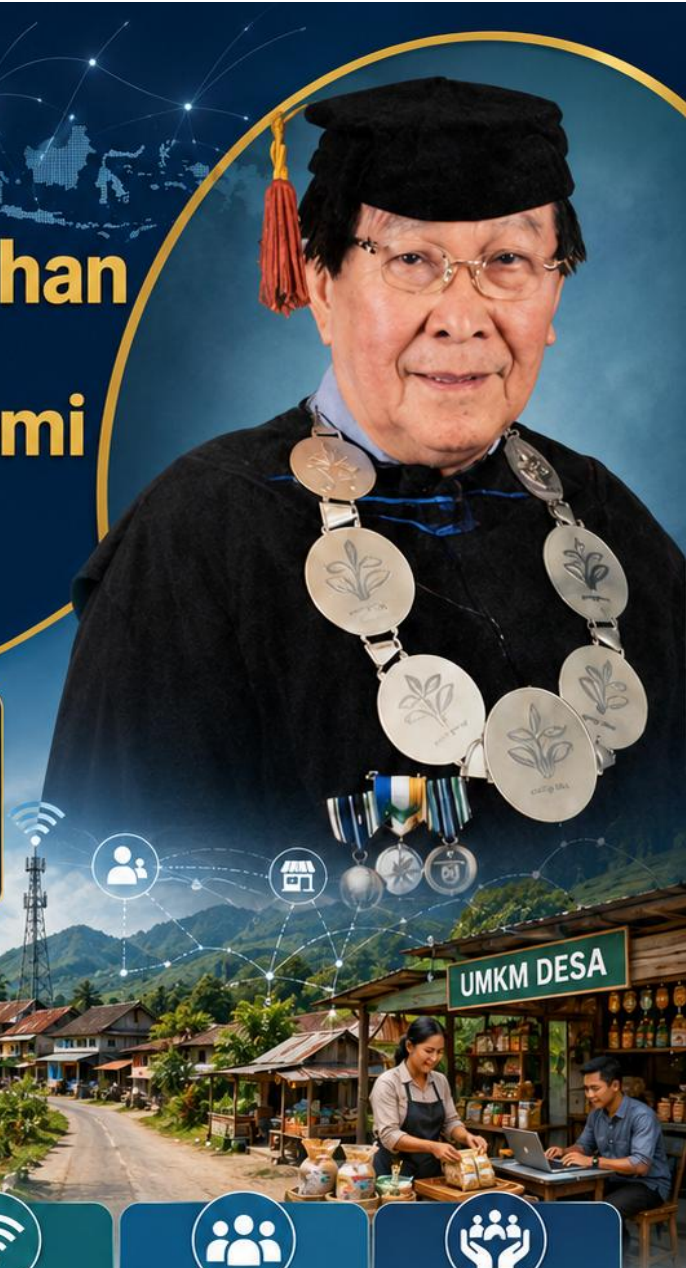
Oleh:
Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD



www.rudyc.com/cv.pdf



IBM-ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia)



UMKM Desa

Menguatkan usaha mikro dan kecil sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan pencipta lapangan kerja.



Pertanian Produktif

Meningkatkan produktivitas pertanian dan nilai tambah komoditas menuju ketahanan pangan dan ekspor.



Konektivitas Digital

Memperluas akses internet dan teknologi untuk membuka pasar, inovasi, dan layanan publik di desa.



Pemberdayaan SDM

Meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan, dan kewirausahaan untuk SDM desa yang unggul.



Ekonomi Inklusif

Membangun kelembagaan desa dan koperasi untuk pertumbuhan yang adil, berkelanjutan, dan tidak meninggalkan siapa pun.

PILAR PEMULIHAN EKONOMI INDONESIA

- ✓ Kemandirian Desa
- ✓ Inovasi & Teknologi
- ✓ Kolaborasi & Gotong Royong

DARI DESA, UNTUK INDONESIA MAJU



DAMPAK NYATA

- 📈 Pertumbuhan Ekonomi Naik
- 📉 Kemiskinan Turun
- 👥 Pemerataan Kesejahteraan
- 🛡️ Indonesia Tangguh & Berdaya Saing



“ Desa bukan hanya penyangga, tetapi pusat kekuatan baru bagi kebangkitan ekonomi Indonesia. ”

— Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD



Abstrak

Artikel ini membahas desa sebagai pusat pertumbuhan baru dalam pemulihan ekonomi Indonesia dengan menempatkan pembangunan perdesaan sebagai strategi produktivitas, penciptaan kerja, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan wilayah. Argumen utama artikel adalah bahwa desa tidak lagi memadai diposisikan hanya sebagai penerima transfer fiskal, pemasok bahan mentah, atau objek kebijakan sosial. Desa perlu berkembang sebagai simpul produksi, pengolahan, jasa, inovasi, kewirausahaan, ekonomi digital, dan ekonomi hijau yang terhubung dengan kota kecil, pasar nasional, serta rantai nilai global. Pembahasan mengintegrasikan Dana Desa, BUM Desa, koperasi, UMKM, transformasi pertanian, hilirisasi, konektivitas fisik dan digital, penguatan SDM, partisipasi perempuan dan pemuda, perhutanan sosial, green jobs, pembiayaan, tata kelola, place-based development, klaster antardesa, smart village, peran perguruan tinggi, serta kemitraan sektor swasta. Artikel juga menawarkan kerangka implementasi berbasis diagnosis ekonomi lokal, portofolio investasi, pengukuran outcome-impact, dan roadmap 2026-2035. Kesimpulannya, pemulihan ekonomi yang inklusif memerlukan perubahan dari paradigma desa sebagai penyangga menjadi desa sebagai penggerak, dengan produktivitas, kualitas institusi, konektivitas, inovasi, dan keberlanjutan sebagai fondasi utama.

Kata Kunci: Desa; pemulihan ekonomi; pembangunan perdesaan; pertumbuhan inklusif; Dana Desa; BUM Desa; UMKM; pertanian; hilirisasi; konektivitas digital; place-based development; ekonomi hijau; kesejahteraan masyarakat.

Catatan Konteks Ekonomi Indonesia 2026

Perekonomian Indonesia menunjukkan resiliensi pada 2026. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026 sebesar 5,61 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Bank Dunia pada Juni 2026 memperkirakan pertumbuhan Indonesia sekitar 5,0 persen pada 2026 dan menekankan pentingnya reformasi produktivitas, kualitas pekerjaan, serta kebijakan yang memastikan pertumbuhan diterjemahkan menjadi peningkatan taraf hidup.

Pada sisi kesejahteraan, BPS mencatat tingkat kemiskinan nasional September 2025 sebesar 8,25 persen. Kemiskinan perdesaan sebesar 10,72 persen, lebih tinggi daripada perkotaan yang sebesar 6,60 persen. Kesenjangan ini mendukung argumen bahwa kualitas pemulihan ekonomi perlu dilihat secara spasial dan bahwa pembangunan desa harus menjadi bagian inti, bukan pelengkap, dari agenda pertumbuhan inklusif.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menempatkan kondisi sosial, ekonomi, dan ekologi sebagai dimensi penting dalam Indeks Desa. Pada 2026 kementerian juga menekankan konektivitas wilayah, pemerataan infrastruktur dasar, transformasi digital desa, tata kelola sumber daya alam berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan hijau berbasis desa. Arah ini konsisten dengan gagasan desa sebagai pusat pertumbuhan yang menggabungkan produktivitas dengan keberlanjutan.

1. Pendahuluan: Mengapa Desa Harus Menjadi Pusat Pertumbuhan Baru

Pemulihan ekonomi Indonesia memasuki fase yang menuntut kualitas pertumbuhan, bukan hanya angka pertumbuhan. Desa perlu dibaca sebagai ruang ekonomi yang memiliki aset produktif, tenaga kerja, pengetahuan lokal, jejaring sosial, sumber daya alam, serta permintaan domestik. Ketika desa hanya diposisikan sebagai penerima transfer dan pemasok komoditas mentah, sebagian besar nilai tambah akan mengalir ke luar wilayah. Sebaliknya, bila produksi, pengolahan, jasa, pembiayaan, pemasaran, dan inovasi dapat berkembang di tingkat lokal, desa dapat menciptakan efek pengganda yang memperbesar pendapatan rumah tangga serta memperluas kesempatan kerja. Secara konseptual, isu ini dapat dibaca melalui tiga lapis analisis. Pertama adalah lapis mikro, yaitu keputusan rumah tangga dan pelaku usaha tentang produksi, konsumsi, investasi, pendidikan, serta strategi menghadapi risiko. Kedua adalah lapis meso, yaitu kualitas pasar lokal, organisasi produsen, koperasi, BUM Desa, jejaring antardesa, dan hubungan dengan pembeli. Ketiga adalah lapis makro dan institusional, yaitu kebijakan fiskal, regulasi, sistem keuangan, perdagangan, konektivitas, dan kebijakan pembangunan wilayah. Ketiga lapis tersebut harus bergerak searah. Jika hanya satu lapis diperbaiki, hasilnya sering terbatas karena hambatan pada lapis lain tetap menahan produktivitas.

Perubahan perspektif ini penting karena pemulihan ekonomi yang inklusif harus menjangkau masyarakat yang berada jauh dari pusat industri dan jasa modern. Data BPS menunjukkan bahwa kemiskinan perdesaan masih lebih tinggi daripada perkotaan, sehingga persoalan desa bukan sekadar ketertinggalan geografis, melainkan juga persoalan struktur ekonomi, produktivitas, akses pasar, kualitas layanan, dan kapasitas kelembagaan. Desa sebagai pusat pertumbuhan berarti mengubah hubungan desa-kota dari pola subordinatif menuju hubungan jaringan yang saling menguatkan. Implikasi kebijakannya adalah perlunya pergeseran dari pendekatan program menuju pendekatan sistem. Program biasanya dimulai dari anggaran dan jenis kegiatan; pendekatan sistem dimulai dari masalah, tujuan ekonomi, aktor, dan mekanisme perubahan. Pertanyaan utamanya bukan 'apa yang dapat dibelanjakan tahun ini', tetapi 'hambatan apa yang menghalangi warga meningkatkan produktivitas dan pendapatan, dan kombinasi intervensi apa yang paling masuk akal untuk mengatasinya'. Orientasi seperti ini mendorong koordinasi lintas sektor serta mengurangi proyek yang berdiri sendiri tanpa hubungan dengan rantai nilai.

Dalam perspektif ekonomi inklusif, perhatian juga harus diberikan pada distribusi manfaat. Pertumbuhan lokal dapat terjadi tetapi tetap eksklusif bila aset, kontrak, informasi, dan jaringan hanya dikuasai kelompok kecil. Karena itu desain kebijakan perlu memeriksa siapa yang memperoleh pekerjaan, siapa yang memiliki aset, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang memiliki suara dalam keputusan. Kelompok miskin, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, masyarakat adat, pekerja informal, serta rumah tangga di lokasi terpencil harus masuk dalam desain sejak awal. Inklusi bukan tambahan setelah pertumbuhan terjadi, melainkan bagian dari arsitektur pertumbuhan itu sendiri.

Dimensi lain adalah keberlanjutan. Peningkatan produksi yang menguras tanah, air, hutan, atau pesisir dapat menciptakan pendapatan sesaat tetapi memperbesar kerentanan di masa depan. Karena itu produktivitas perlu dipahami sebagai kemampuan menghasilkan nilai lebih besar dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan risiko lingkungan yang lebih rendah. Investasi dalam efisiensi air, energi bersih, diversifikasi, agroforestri, pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, dan adaptasi iklim dapat diposisikan sebagai strategi ekonomi, bukan sekadar kewajiban lingkungan.

Dari sisi manajemen, keberhasilan memerlukan pembagian peran yang jelas. Pemerintah desa berfungsi sebagai pengarah, penyedia barang publik lokal, dan fasilitator; pelaku usaha menjalankan kegiatan

komersial; kelompok masyarakat mengorganisasi partisipasi dan kontrol sosial; lembaga keuangan menyediakan modal; perguruan tinggi mendukung pengetahuan; sementara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat menyediakan regulasi, konektivitas, standardisasi, dan pembiayaan yang melampaui kemampuan desa. Ketika satu aktor mengambil alih semua fungsi, sistem cenderung tidak efisien dan sulit dipertahankan.

Untuk melihat penerapannya, bayangkan sebuah desa yang memiliki satu komoditas unggulan tetapi pendapatan petani tetap rendah. Diagnosis mungkin menunjukkan bahwa masalah utama bukan kurangnya produksi, melainkan kualitas yang tidak seragam, kehilangan pascapanen, penjualan individual, dan biaya logistik. Solusi yang relevan bukan hanya subsidi input. Desa dapat mengembangkan standar panen, fasilitas pengumpulan, pencatatan mutu, pengolahan sederhana, kontrak dengan pembeli, dan pembiayaan modal kerja. Contoh ilustratif ini menunjukkan bahwa strategi pertumbuhan harus mengintervensi titik lemah yang benar-benar menentukan nilai tambah.

Mekanisme transmisi menuju kesejahteraan dapat dijelaskan sebagai rantai: investasi publik dan kelembagaan menurunkan biaya transaksi; penurunan biaya meningkatkan kelayakan usaha; usaha yang lebih layak mendorong investasi swasta dan adopsi teknologi; produktivitas yang meningkat memperbesar surplus; surplus memungkinkan upah, keuntungan, dan penerimaan lokal meningkat; peningkatan pendapatan memperkuat konsumsi, tabungan, pendidikan, kesehatan, dan aset rumah tangga. Rantai ini tidak otomatis. Bila pasar tenaga kerja lemah atau kekuatan tawar timpang, produktivitas dapat meningkat tanpa peningkatan pendapatan yang proporsional. Karena itu kualitas institusi pasar dan perlindungan sosial tetap penting.

2. Pemulihan Ekonomi Indonesia: Dari Resiliensi Makro ke Kesejahteraan Mikro

Pertumbuhan ekonomi nasional harus diterjemahkan ke dalam indikator yang dirasakan rumah tangga: kesempatan kerja, pendapatan riil, kestabilan harga kebutuhan pokok, akses layanan dasar, dan kemampuan membangun aset. Pada triwulan I-2026 ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan, sedangkan Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan sekitar 5,0 persen pada 2026. Angka ini menunjukkan resiliensi, tetapi belum otomatis membuktikan bahwa manfaat pemulihan tersebar merata secara spasial maupun sosial. Secara konseptual, isu ini dapat dibaca melalui tiga lapis analisis. Pertama adalah lapis mikro, yaitu keputusan rumah tangga dan pelaku usaha tentang produksi, konsumsi, investasi, pendidikan, serta strategi menghadapi risiko. Kedua adalah lapis meso, yaitu kualitas pasar lokal, organisasi produsen, koperasi, BUM Desa, jejaring antardesa, dan hubungan dengan pembeli. Ketiga adalah lapis makro dan institusional, yaitu kebijakan fiskal, regulasi, sistem keuangan, perdagangan, konektivitas, dan kebijakan pembangunan wilayah. Ketiga lapis tersebut harus bergerak searah. Jika hanya satu lapis diperbaiki, hasilnya sering terbatas karena hambatan pada lapis lain tetap menahan produktivitas.

Pemulihan berbasis desa dapat memperkuat sisi permintaan sekaligus sisi penawaran. Di sisi penawaran, desa meningkatkan kapasitas produksi pangan, agroindustri, jasa, pariwisata, ekonomi kreatif, dan produk berbasis sumber daya lokal. Di sisi permintaan, meningkatnya pendapatan desa akan memperbesar konsumsi lokal, mendorong perdagangan antardesa dan kota kecil, serta memperluas basis pasar domestik. Karena itu, desa tidak boleh dilihat hanya sebagai sasaran kebijakan sosial, tetapi sebagai bagian dari arsitektur pertumbuhan nasional. Implikasi kebijakannya adalah perlunya pergeseran dari pendekatan program menuju pendekatan sistem. Program biasanya dimulai dari anggaran dan jenis kegiatan; pendekatan sistem dimulai dari masalah, tujuan ekonomi, aktor, dan mekanisme perubahan. Pertanyaan

utamanya bukan 'apa yang dapat dibelanjakan tahun ini', tetapi 'hambatan apa yang menghalangi warga meningkatkan produktivitas dan pendapatan, dan kombinasi intervensi apa yang paling masuk akal untuk mengatasinya'. Orientasi seperti ini mendorong koordinasi lintas sektor serta mengurangi proyek yang berdiri sendiri tanpa hubungan dengan rantai nilai.

Dalam perspektif ekonomi inklusif, perhatian juga harus diberikan pada distribusi manfaat. Pertumbuhan lokal dapat terjadi tetapi tetap eksklusif bila aset, kontrak, informasi, dan jaringan hanya dikuasai kelompok kecil. Karena itu desain kebijakan perlu memeriksa siapa yang memperoleh pekerjaan, siapa yang memiliki aset, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang memiliki suara dalam keputusan. Kelompok miskin, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, masyarakat adat, pekerja informal, serta rumah tangga di lokasi terpencil harus masuk dalam desain sejak awal. Inklusi bukan tambahan setelah pertumbuhan terjadi, melainkan bagian dari arsitektur pertumbuhan itu sendiri.

Dimensi lain adalah keberlanjutan. Peningkatan produksi yang menguras tanah, air, hutan, atau pesisir dapat menciptakan pendapatan sesaat tetapi memperbesar kerentanan di masa depan. Karena itu produktivitas perlu dipahami sebagai kemampuan menghasilkan nilai lebih besar dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan risiko lingkungan yang lebih rendah. Investasi dalam efisiensi air, energi bersih, diversifikasi, agroforestri, pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, dan adaptasi iklim dapat diposisikan sebagai strategi ekonomi, bukan sekadar kewajiban lingkungan.

Dari sisi manajemen, keberhasilan memerlukan pembagian peran yang jelas. Pemerintah desa berfungsi sebagai pengarah, penyedia barang publik lokal, dan fasilitator; pelaku usaha menjalankan kegiatan komersial; kelompok masyarakat mengorganisasi partisipasi dan kontrol sosial; lembaga keuangan menyediakan modal; perguruan tinggi mendukung pengetahuan; sementara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat menyediakan regulasi, konektivitas, standardisasi, dan pembiayaan yang melampaui kemampuan desa. Ketika satu aktor mengambil alih semua fungsi, sistem cenderung tidak efisien dan sulit dipertahankan.

Untuk melihat penerapannya, bayangkan sebuah desa yang memiliki satu komoditas unggulan tetapi pendapatan petani tetap rendah. Diagnosis mungkin menunjukkan bahwa masalah utama bukan kurangnya produksi, melainkan kualitas yang tidak seragam, kehilangan pascapanen, penjualan individual, dan biaya logistik. Solusi yang relevan bukan hanya subsidi input. Desa dapat mengembangkan standar panen, fasilitas pengumpulan, pencatatan mutu, pengolahan sederhana, kontrak dengan pembeli, dan pembiayaan modal kerja. Contoh ilustratif ini menunjukkan bahwa strategi pertumbuhan harus mengintervensi titik lemah yang benar-benar menentukan nilai tambah.

Indikator operasional perlu disusun dalam dashboard sederhana. Pada sisi ekonomi dapat digunakan produktivitas per pekerja, omzet usaha, nilai tambah per kilogram produk, jumlah pelanggan di luar desa, proporsi produk yang diolah lokal, dan biaya logistik. Pada sisi sosial dapat digunakan pendapatan rumah tangga, kemiskinan, partisipasi perempuan dan pemuda, akses pelatihan, serta kualitas pekerjaan. Pada sisi lingkungan dapat digunakan tutupan vegetasi, kualitas air, efisiensi energi, pengelolaan sampah, dan risiko bencana. Pada sisi kelembagaan dapat digunakan transparansi anggaran, kualitas laporan usaha, tingkat partisipasi, dan penyelesaian pengaduan.

3. Ketimpangan Desa-Kota dan Tantangan Inklusi

Perbedaan peluang ekonomi antara wilayah perkotaan dan perdesaan terbentuk dari kombinasi produktivitas, kualitas infrastruktur, kedalaman pasar, akses pembiayaan, pendidikan, kesehatan, digitalisasi, dan kedekatan dengan simpul logistik. Kesenjangan tersebut membuat rumah tangga desa lebih rentan terhadap guncangan harga, cuaca, kegagalan panen, biaya transportasi, dan keterbatasan pilihan pekerjaan. Ketika produktivitas rendah dan pilihan kerja sempit, migrasi ke kota sering menjadi strategi rumah tangga, namun migrasi yang tidak disertai peningkatan keterampilan dapat memindahkan kemiskinan dari desa ke kawasan urban. Secara konseptual, isu ini dapat dibaca melalui tiga lapis analisis. Pertama adalah lapis mikro, yaitu keputusan rumah tangga dan pelaku usaha tentang produksi, konsumsi, investasi, pendidikan, serta strategi menghadapi risiko. Kedua adalah lapis meso, yaitu kualitas pasar lokal, organisasi produsen, koperasi, BUM Desa, jejaring antardesa, dan hubungan dengan pembeli. Ketiga adalah lapis makro dan institusional, yaitu kebijakan fiskal, regulasi, sistem keuangan, perdagangan, konektivitas, dan kebijakan pembangunan wilayah. Ketiga lapis tersebut harus bergerak searah. Jika hanya satu lapis diperbaiki, hasilnya sering terbatas karena hambatan pada lapis lain tetap menahan produktivitas.

Pembangunan yang inklusif tidak berarti setiap desa harus memiliki struktur ekonomi yang sama. Inklusi justru menuntut diferensiasi kebijakan berdasarkan potensi dan keterbatasan wilayah. Desa pertanian, desa pesisir, desa hutan, desa wisata, desa perbatasan, desa sekitar kawasan industri, dan desa penyangga perkotaan memerlukan strategi berbeda. Pendekatan berbasis tempat atau place-based development menjadi penting karena kebijakan yang seragam cenderung mengabaikan variasi sosial, ekologis, budaya, dan ekonomi. Implikasi kebijakannya adalah perlunya pergeseran dari pendekatan program menuju pendekatan sistem. Program biasanya dimulai dari anggaran dan jenis kegiatan; pendekatan sistem dimulai dari masalah, tujuan ekonomi, aktor, dan mekanisme perubahan. Pertanyaan utamanya bukan 'apa yang dapat dibelanjakan tahun ini', tetapi 'hambatan apa yang menghalangi warga meningkatkan produktivitas dan pendapatan, dan kombinasi intervensi apa yang paling masuk akal untuk mengatasinya'. Orientasi seperti ini mendorong koordinasi lintas sektor serta mengurangi proyek yang berdiri sendiri tanpa hubungan dengan rantai nilai.

Dalam perspektif ekonomi inklusif, perhatian juga harus diberikan pada distribusi manfaat. Pertumbuhan lokal dapat terjadi tetapi tetap eksklusif bila aset, kontrak, informasi, dan jaringan hanya dikuasai kelompok kecil. Karena itu desain kebijakan perlu memeriksa siapa yang memperoleh pekerjaan, siapa yang memiliki aset, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang memiliki suara dalam keputusan. Kelompok miskin, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, masyarakat adat, pekerja informal, serta rumah tangga di lokasi terpencil harus masuk dalam desain sejak awal. Inklusi bukan tambahan setelah pertumbuhan terjadi, melainkan bagian dari arsitektur pertumbuhan itu sendiri.

Dimensi lain adalah keberlanjutan. Peningkatan produksi yang menguras tanah, air, hutan, atau pesisir dapat menciptakan pendapatan sesaat tetapi memperbesar kerentanan di masa depan. Karena itu produktivitas perlu dipahami sebagai kemampuan menghasilkan nilai lebih besar dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan risiko lingkungan yang lebih rendah. Investasi dalam efisiensi air, energi bersih, diversifikasi, agroforestri, pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, dan adaptasi iklim dapat diposisikan sebagai strategi ekonomi, bukan sekadar kewajiban lingkungan.

Dari sisi manajemen, keberhasilan memerlukan pembagian peran yang jelas. Pemerintah desa berfungsi sebagai pengarah, penyedia barang publik lokal, dan fasilitator; pelaku usaha menjalankan kegiatan komersial; kelompok masyarakat mengorganisasi partisipasi dan kontrol sosial; lembaga keuangan

menyediakan modal; perguruan tinggi mendukung pengetahuan; sementara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat menyediakan regulasi, konektivitas, standardisasi, dan pembiayaan yang melampaui kemampuan desa. Ketika satu aktor mengambil alih semua fungsi, sistem cenderung tidak efisien dan sulit dipertahankan.

Untuk melihat penerapannya, bayangkan sebuah desa yang memiliki satu komoditas unggulan tetapi pendapatan petani tetap rendah. Diagnosis mungkin menunjukkan bahwa masalah utama bukan kurangnya produksi, melainkan kualitas yang tidak seragam, kehilangan pascapanen, penjualan individual, dan biaya logistik. Solusi yang relevan bukan hanya subsidi input. Desa dapat mengembangkan standar panen, fasilitas pengumpulan, pencatatan mutu, pengolahan sederhana, kontrak dengan pembeli, dan pembiayaan modal kerja. Contoh ilustratif ini menunjukkan bahwa strategi pertumbuhan harus mengintervensi titik lemah yang benar-benar menentukan nilai tambah.

Setiap strategi perlu menyertakan risk register. Risiko pasar mencakup turunnya harga dan hilangnya pembeli; risiko produksi mencakup cuaca, penyakit, dan kegagalan teknologi; risiko finansial mencakup arus kas dan utang; risiko kelembagaan mencakup konflik kepentingan dan pergantian kepemimpinan; risiko sosial mencakup eksklusi kelompok lemah; risiko lingkungan mencakup degradasi sumber daya; dan risiko digital mencakup kebocoran data serta penipuan. Menyebut risiko bukan alasan untuk tidak berinovasi, tetapi cara agar inovasi dilakukan dengan disiplin.

4. Desa sebagai Sistem Ekonomi Lokal

Desa dapat dipahami sebagai sistem ekonomi yang terdiri atas rumah tangga, usaha mikro dan kecil, kelompok tani, koperasi, BUM Desa, pedagang, lembaga keuangan, pemerintah desa, organisasi sosial, serta hubungan dengan pasar di luar desa. Kinerja sistem ini ditentukan bukan hanya oleh jumlah aset, tetapi oleh kualitas hubungan di antara aktor. Jalan desa tanpa akses pasar yang baik tidak cukup; pelatihan tanpa pembeli tidak cukup; produksi tanpa standar mutu tidak cukup; pembiayaan tanpa kapasitas manajerial juga tidak cukup. Secara konseptual, isu ini dapat dibaca melalui tiga lapis analisis. Pertama adalah lapis mikro, yaitu keputusan rumah tangga dan pelaku usaha tentang produksi, konsumsi, investasi, pendidikan, serta strategi menghadapi risiko. Kedua adalah lapis meso, yaitu kualitas pasar lokal, organisasi produsen, koperasi, BUM Desa, jejaring antardesa, dan hubungan dengan pembeli. Ketiga adalah lapis makro dan institusional, yaitu kebijakan fiskal, regulasi, sistem keuangan, perdagangan, konektivitas, dan kebijakan pembangunan wilayah. Ketiga lapis tersebut harus bergerak searah. Jika hanya satu lapis diperbaiki, hasilnya sering terbatas karena hambatan pada lapis lain tetap menahan produktivitas.

Karena itu strategi pertumbuhan desa memerlukan pendekatan ekosistem. Infrastruktur, keterampilan, kelembagaan, informasi pasar, teknologi, modal, dan tata kelola harus dipertemukan dalam rantai nilai yang nyata. Desa yang memproduksi kopi, misalnya, perlu memetakan dari budidaya hingga pengolahan, pengemasan, sertifikasi, logistik, pemasaran digital, pengalaman wisata, hingga pemanfaatan limbah. Nilai tambah tumbuh ketika lebih banyak tahap rantai nilai dapat dikerjakan secara kompetitif di wilayah desa atau jejaring antardesa. Implikasi kebijakannya adalah perlunya pergeseran dari pendekatan program menuju pendekatan sistem. Program biasanya dimulai dari anggaran dan jenis kegiatan; pendekatan sistem dimulai dari masalah, tujuan ekonomi, aktor, dan mekanisme perubahan. Pertanyaan utamanya bukan 'apa yang dapat dibelanjakan tahun ini', tetapi 'hambatan apa yang menghalangi warga meningkatkan produktivitas dan pendapatan, dan kombinasi intervensi apa yang paling masuk akal untuk mengatasinya'.

Orientasi seperti ini mendorong koordinasi lintas sektor serta mengurangi proyek yang berdiri sendiri tanpa hubungan dengan rantai nilai.

Dalam perspektif ekonomi inklusif, perhatian juga harus diberikan pada distribusi manfaat. Pertumbuhan lokal dapat terjadi tetapi tetap eksklusif bila aset, kontrak, informasi, dan jaringan hanya dikuasai kelompok kecil. Karena itu desain kebijakan perlu memeriksa siapa yang memperoleh pekerjaan, siapa yang memiliki aset, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang memiliki suara dalam keputusan. Kelompok miskin, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, masyarakat adat, pekerja informal, serta rumah tangga di lokasi terpencil harus masuk dalam desain sejak awal. Inklusi bukan tambahan setelah pertumbuhan terjadi, melainkan bagian dari arsitektur pertumbuhan itu sendiri.

Dimensi lain adalah keberlanjutan. Peningkatan produksi yang menguras tanah, air, hutan, atau pesisir dapat menciptakan pendapatan sesaat tetapi memperbesar kerentanan di masa depan. Karena itu produktivitas perlu dipahami sebagai kemampuan menghasilkan nilai lebih besar dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan risiko lingkungan yang lebih rendah. Investasi dalam efisiensi air, energi bersih, diversifikasi, agroforestri, pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, dan adaptasi iklim dapat diposisikan sebagai strategi ekonomi, bukan sekadar kewajiban lingkungan.

Dari sisi manajemen, keberhasilan memerlukan pembagian peran yang jelas. Pemerintah desa berfungsi sebagai pengarah, penyedia barang publik lokal, dan fasilitator; pelaku usaha menjalankan kegiatan komersial; kelompok masyarakat mengorganisasi partisipasi dan kontrol sosial; lembaga keuangan menyediakan modal; perguruan tinggi mendukung pengetahuan; sementara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat menyediakan regulasi, konektivitas, standardisasi, dan pembiayaan yang melampaui kemampuan desa. Ketika satu aktor mengambil alih semua fungsi, sistem cenderung tidak efisien dan sulit dipertahankan.

Untuk melihat penerapannya, bayangkan sebuah desa yang memiliki satu komoditas unggulan tetapi pendapatan petani tetap rendah. Diagnosis mungkin menunjukkan bahwa masalah utama bukan kurangnya produksi, melainkan kualitas yang tidak seragam, kehilangan pascapanen, penjualan individual, dan biaya logistik. Solusi yang relevan bukan hanya subsidi input. Desa dapat mengembangkan standar panen, fasilitas pengumpulan, pencatatan mutu, pengolahan sederhana, kontrak dengan pembeli, dan pembiayaan modal kerja. Contoh ilustratif ini menunjukkan bahwa strategi pertumbuhan harus mengintervensi titik lemah yang benar-benar menentukan nilai tambah.

Mekanisme transmisi menuju kesejahteraan dapat dijelaskan sebagai rantai: investasi publik dan kelembagaan menurunkan biaya transaksi; penurunan biaya meningkatkan kelayakan usaha; usaha yang lebih layak mendorong investasi swasta dan adopsi teknologi; produktivitas yang meningkat memperbesar surplus; surplus memungkinkan upah, keuntungan, dan penerimaan lokal meningkat; peningkatan pendapatan memperkuat konsumsi, tabungan, pendidikan, kesehatan, dan aset rumah tangga. Rantai ini tidak otomatis. Bila pasar tenaga kerja lemah atau kekuatan tawar timpang, produktivitas dapat meningkat tanpa peningkatan pendapatan yang proporsional. Karena itu kualitas institusi pasar dan perlindungan sosial tetap penting.

5. Dana Desa: Dari Infrastruktur Dasar ke Infrastruktur Produktivitas

Dana Desa telah memperkuat kapasitas fiskal lokal dan memungkinkan desa membangun infrastruktur yang sebelumnya sulit dibiayai. Pada fase awal, jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, dan fasilitas dasar

merupakan kebutuhan mendesak. Namun, setelah fondasi dasar terbentuk, orientasi belanja perlu semakin diarahkan pada infrastruktur produktivitas dan pemberdayaan ekonomi tanpa meninggalkan layanan dasar. Secara konseptual, isu ini dapat dibaca melalui tiga lapis analisis. Pertama adalah lapis mikro, yaitu keputusan rumah tangga dan pelaku usaha tentang produksi, konsumsi, investasi, pendidikan, serta strategi menghadapi risiko. Kedua adalah lapis meso, yaitu kualitas pasar lokal, organisasi produsen, koperasi, BUM Desa, jejaring antardesa, dan hubungan dengan pembeli. Ketiga adalah lapis makro dan institusional, yaitu kebijakan fiskal, regulasi, sistem keuangan, perdagangan, konektivitas, dan kebijakan pembangunan wilayah. Ketiga lapis tersebut harus bergerak searah. Jika hanya satu lapis diperbaiki, hasilnya sering terbatas karena hambatan pada lapis lain tetap menahan produktivitas.

Infrastruktur produktivitas dapat berupa jalan usaha tani, penyimpanan dingin, gudang, irigasi mikro, pengolahan hasil, pasar desa, internet, pusat pelatihan, ruang kerja bersama, fasilitas standardisasi, atau sistem informasi komoditas. Nilai suatu proyek bukan terletak pada fisiknya, melainkan pada kemampuan proyek tersebut menurunkan biaya transaksi, mengurangi kehilangan hasil, meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, serta menciptakan pekerjaan. Dana Desa akan berfungsi lebih transformatif bila keputusan investasi didasarkan pada diagnosis ekonomi lokal, data, dan partisipasi warga. Implikasi kebijakannya adalah perlunya pergeseran dari pendekatan program menuju pendekatan sistem. Program biasanya dimulai dari anggaran dan jenis kegiatan; pendekatan sistem dimulai dari masalah, tujuan ekonomi, aktor, dan mekanisme perubahan. Pertanyaan utamanya bukan 'apa yang dapat dibelanjakan tahun ini', tetapi 'hambatan apa yang menghalangi warga meningkatkan produktivitas dan pendapatan, dan kombinasi intervensi apa yang paling masuk akal untuk mengatasinya'. Orientasi seperti ini mendorong koordinasi lintas sektor serta mengurangi proyek yang berdiri sendiri tanpa hubungan dengan rantai nilai.

Dalam perspektif ekonomi inklusif, perhatian juga harus diberikan pada distribusi manfaat. Pertumbuhan lokal dapat terjadi tetapi tetap eksklusif bila aset, kontrak, informasi, dan jaringan hanya dikuasai kelompok kecil. Karena itu desain kebijakan perlu memeriksa siapa yang memperoleh pekerjaan, siapa yang memiliki aset, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang memiliki suara dalam keputusan. Kelompok miskin, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, masyarakat adat, pekerja informal, serta rumah tangga di lokasi terpencil harus masuk dalam desain sejak awal. Inklusi bukan tambahan setelah pertumbuhan terjadi, melainkan bagian dari arsitektur pertumbuhan itu sendiri.

Dimensi lain adalah keberlanjutan. Peningkatan produksi yang menguras tanah, air, hutan, atau pesisir dapat menciptakan pendapatan sesaat tetapi memperbesar kerentanan di masa depan. Karena itu produktivitas perlu dipahami sebagai kemampuan menghasilkan nilai lebih besar dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan risiko lingkungan yang lebih rendah. Investasi dalam efisiensi air, energi bersih, diversifikasi, agroforestri, pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, dan adaptasi iklim dapat diposisikan sebagai strategi ekonomi, bukan sekadar kewajiban lingkungan.

Dari sisi manajemen, keberhasilan memerlukan pembagian peran yang jelas. Pemerintah desa berfungsi sebagai pengarah, penyedia barang publik lokal, dan fasilitator; pelaku usaha menjalankan kegiatan komersial; kelompok masyarakat mengorganisasi partisipasi dan kontrol sosial; lembaga keuangan menyediakan modal; perguruan tinggi mendukung pengetahuan; sementara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat menyediakan regulasi, konektivitas, standardisasi, dan pembiayaan yang melampaui kemampuan desa. Ketika satu aktor mengambil alih semua fungsi, sistem cenderung tidak efisien dan sulit dipertahankan.

Untuk melihat penerapannya, bayangkan sebuah desa yang memiliki satu komoditas unggulan tetapi pendapatan petani tetap rendah. Diagnosis mungkin menunjukkan bahwa masalah utama bukan kurangnya produksi, melainkan kualitas yang tidak seragam, kehilangan pascapanen, penjualan individual, dan biaya logistik. Solusi yang relevan bukan hanya subsidi input. Desa dapat mengembangkan standar panen, fasilitas pengumpulan, pencatatan mutu, pengolahan sederhana, kontrak dengan pembeli, dan pembiayaan modal kerja. Contoh ilustratif ini menunjukkan bahwa strategi pertumbuhan harus mengintervensi titik lemah yang benar-benar menentukan nilai tambah.

Indikator operasional perlu disusun dalam dashboard sederhana. Pada sisi ekonomi dapat digunakan produktivitas per pekerja, omzet usaha, nilai tambah per kilogram produk, jumlah pelanggan di luar desa, proporsi produk yang diolah lokal, dan biaya logistik. Pada sisi sosial dapat digunakan pendapatan rumah tangga, kemiskinan, partisipasi perempuan dan pemuda, akses pelatihan, serta kualitas pekerjaan. Pada sisi lingkungan dapat digunakan tutupan vegetasi, kualitas air, efisiensi energi, pengelolaan sampah, dan risiko bencana. Pada sisi kelembagaan dapat digunakan transparansi anggaran, kualitas laporan usaha, tingkat partisipasi, dan penyelesaian pengaduan.

6. BUM Desa dan Koperasi sebagai Institusi Pengungkit

BUM Desa dan koperasi mempunyai posisi strategis sebagai lembaga yang dapat mengatasi kegagalan koordinasi di tingkat lokal. Banyak pelaku usaha desa terlalu kecil untuk membeli mesin, membangun merek, menyewa profesional, menanggung biaya sertifikasi, atau bernegosiasi dengan pembeli besar secara individual. Kelembagaan kolektif memungkinkan penggabungan volume, standardisasi mutu, pembelian input bersama, pengolahan bersama, logistik bersama, dan pemasaran bersama. Secara konseptual, isu ini dapat dibaca melalui tiga lapis analisis. Pertama adalah lapis mikro, yaitu keputusan rumah tangga dan pelaku usaha tentang produksi, konsumsi, investasi, pendidikan, serta strategi menghadapi risiko. Kedua adalah lapis meso, yaitu kualitas pasar lokal, organisasi produsen, koperasi, BUM Desa, jejaring antardesa, dan hubungan dengan pembeli. Ketiga adalah lapis makro dan institusional, yaitu kebijakan fiskal, regulasi, sistem keuangan, perdagangan, konektivitas, dan kebijakan pembangunan wilayah. Ketiga lapis tersebut harus bergerak searah. Jika hanya satu lapis diperbaiki, hasilnya sering terbatas karena hambatan pada lapis lain tetap menahan produktivitas.

Namun kelembagaan ekonomi desa harus dijauhkan dari pendekatan administratif semata. BUM Desa yang dibentuk hanya untuk memenuhi program tanpa model bisnis, tata kelola, kompetensi, dan akuntabilitas akan sulit berkelanjutan. Profesionalisme, pemisahan fungsi politik dan bisnis, transparansi laporan, mekanisme pengawasan, serta indikator kinerja menjadi penting. Koperasi dan BUM Desa juga tidak perlu bersaing; keduanya dapat berbagi fungsi sesuai kebutuhan rantai nilai. Implikasi kebijakannya adalah perlunya pergeseran dari pendekatan program menuju pendekatan sistem. Program biasanya dimulai dari anggaran dan jenis kegiatan; pendekatan sistem dimulai dari masalah, tujuan ekonomi, aktor, dan mekanisme perubahan. Pertanyaan utamanya bukan 'apa yang dapat dibelanjakan tahun ini', tetapi 'hambatan apa yang menghalangi warga meningkatkan produktivitas dan pendapatan, dan kombinasi intervensi apa yang paling masuk akal untuk mengatasinya'. Orientasi seperti ini mendorong koordinasi lintas sektor serta mengurangi proyek yang berdiri sendiri tanpa hubungan dengan rantai nilai.

Dalam perspektif ekonomi inklusif, perhatian juga harus diberikan pada distribusi manfaat. Pertumbuhan lokal dapat terjadi tetapi tetap eksklusif bila aset, kontrak, informasi, dan jaringan hanya dikuasai kelompok kecil. Karena itu desain kebijakan perlu memeriksa siapa yang memperoleh pekerjaan, siapa yang memiliki

aset, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang memiliki suara dalam keputusan. Kelompok miskin, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, masyarakat adat, pekerja informal, serta rumah tangga di lokasi terpencil harus masuk dalam desain sejak awal. Inklusi bukan tambahan setelah pertumbuhan terjadi, melainkan bagian dari arsitektur pertumbuhan itu sendiri.

Dimensi lain adalah keberlanjutan. Peningkatan produksi yang menguras tanah, air, hutan, atau pesisir dapat menciptakan pendapatan sesaat tetapi memperbesar kerentanan di masa depan. Karena itu produktivitas perlu dipahami sebagai kemampuan menghasilkan nilai lebih besar dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan risiko lingkungan yang lebih rendah. Investasi dalam efisiensi air, energi bersih, diversifikasi, agroforestri, pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, dan adaptasi iklim dapat diposisikan sebagai strategi ekonomi, bukan sekadar kewajiban lingkungan.

Dari sisi manajemen, keberhasilan memerlukan pembagian peran yang jelas. Pemerintah desa berfungsi sebagai pengarah, penyedia barang publik lokal, dan fasilitator; pelaku usaha menjalankan kegiatan komersial; kelompok masyarakat mengorganisasi partisipasi dan kontrol sosial; lembaga keuangan menyediakan modal; perguruan tinggi mendukung pengetahuan; sementara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat menyediakan regulasi, konektivitas, standardisasi, dan pembiayaan yang melampaui kemampuan desa. Ketika satu aktor mengambil alih semua fungsi, sistem cenderung tidak efisien dan sulit dipertahankan.

Untuk melihat penerapannya, bayangkan sebuah desa yang memiliki satu komoditas unggulan tetapi pendapatan petani tetap rendah. Diagnosis mungkin menunjukkan bahwa masalah utama bukan kurangnya produksi, melainkan kualitas yang tidak seragam, kehilangan pascapanen, penjualan individual, dan biaya logistik. Solusi yang relevan bukan hanya subsidi input. Desa dapat mengembangkan standar panen, fasilitas pengumpulan, pencatatan mutu, pengolahan sederhana, kontrak dengan pembeli, dan pembiayaan modal kerja. Contoh ilustratif ini menunjukkan bahwa strategi pertumbuhan harus mengintervensi titik lemah yang benar-benar menentukan nilai tambah.

Setiap strategi perlu menyertakan risk register. Risiko pasar mencakup turunnya harga dan hilangnya pembeli; risiko produksi mencakup cuaca, penyakit, dan kegagalan teknologi; risiko finansial mencakup arus kas dan utang; risiko kelembagaan mencakup konflik kepentingan dan pergantian kepemimpinan; risiko sosial mencakup eksklusi kelompok lemah; risiko lingkungan mencakup degradasi sumber daya; dan risiko digital mencakup kebocoran data serta penipuan. Menyebut risiko bukan alasan untuk tidak berinovasi, tetapi cara agar inovasi dilakukan dengan disiplin.

7. UMKM Desa sebagai Mesin Penciptaan Lapangan Kerja

UMKM desa menyediakan jalur paling langsung untuk mengubah sumber daya lokal menjadi pendapatan. Mereka menyerap tenaga kerja, memperluas pilihan pekerjaan non-pertanian, melayani kebutuhan masyarakat, dan sering menjadi pintu masuk kewirausahaan perempuan maupun pemuda. Tantangannya adalah banyak usaha berada pada tingkat subsisten, berproduktivitas rendah, dan sulit naik kelas karena akses teknologi, modal, desain, pemasaran, dan manajemen terbatas. Secara konseptual, isu ini dapat dibaca melalui tiga lapis analisis. Pertama adalah lapis mikro, yaitu keputusan rumah tangga dan pelaku usaha tentang produksi, konsumsi, investasi, pendidikan, serta strategi menghadapi risiko. Kedua adalah lapis meso, yaitu kualitas pasar lokal, organisasi produsen, koperasi, BUM Desa, jejaring antardesa, dan hubungan dengan pembeli. Ketiga adalah lapis makro dan institusional, yaitu kebijakan fiskal, regulasi,

sistem keuangan, perdagangan, konektivitas, dan kebijakan pembangunan wilayah. Ketiga lapis tersebut harus bergerak searah. Jika hanya satu lapis diperbaiki, hasilnya sering terbatas karena hambatan pada lapis lain tetap menahan produktivitas.

Kebijakan UMKM desa perlu berpindah dari sekadar memperbanyak jumlah usaha menuju peningkatan produktivitas dan survival rate. Program inkubasi harus menghubungkan wirausahawan dengan mentor, pembeli, pemasok, lembaga pembiayaan, perguruan tinggi, dan platform digital. Kinerja tidak cukup diukur dari jumlah peserta pelatihan, tetapi dari peningkatan omzet, margin, produktivitas tenaga kerja, perluasan pasar, formalitas usaha, kualitas pekerjaan, dan kemampuan bertahan melewati siklus bisnis. Implikasi kebijakannya adalah perlunya pergeseran dari pendekatan program menuju pendekatan sistem. Program biasanya dimulai dari anggaran dan jenis kegiatan; pendekatan sistem dimulai dari masalah, tujuan ekonomi, aktor, dan mekanisme perubahan. Pertanyaan utamanya bukan 'apa yang dapat dibelanjakan tahun ini', tetapi 'hambatan apa yang menghalangi warga meningkatkan produktivitas dan pendapatan, dan kombinasi intervensi apa yang paling masuk akal untuk mengatasinya'. Orientasi seperti ini mendorong koordinasi lintas sektor serta mengurangi proyek yang berdiri sendiri tanpa hubungan dengan rantai nilai.

Dalam perspektif ekonomi inklusif, perhatian juga harus diberikan pada distribusi manfaat. Pertumbuhan lokal dapat terjadi tetapi tetap eksklusif bila aset, kontrak, informasi, dan jaringan hanya dikuasai kelompok kecil. Karena itu desain kebijakan perlu memeriksa siapa yang memperoleh pekerjaan, siapa yang memiliki aset, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang memiliki suara dalam keputusan. Kelompok miskin, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, masyarakat adat, pekerja informal, serta rumah tangga di lokasi terpencil harus masuk dalam desain sejak awal. Inklusi bukan tambahan setelah pertumbuhan terjadi, melainkan bagian dari arsitektur pertumbuhan itu sendiri.

Dimensi lain adalah keberlanjutan. Peningkatan produksi yang menguras tanah, air, hutan, atau pesisir dapat menciptakan pendapatan sesaat tetapi memperbesar kerentanan di masa depan. Karena itu produktivitas perlu dipahami sebagai kemampuan menghasilkan nilai lebih besar dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan risiko lingkungan yang lebih rendah. Investasi dalam efisiensi air, energi bersih, diversifikasi, agroforestri, pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, dan adaptasi iklim dapat diposisikan sebagai strategi ekonomi, bukan sekadar kewajiban lingkungan.

Dari sisi manajemen, keberhasilan memerlukan pembagian peran yang jelas. Pemerintah desa berfungsi sebagai pengarah, penyedia barang publik lokal, dan fasilitator; pelaku usaha menjalankan kegiatan komersial; kelompok masyarakat mengorganisasi partisipasi dan kontrol sosial; lembaga keuangan menyediakan modal; perguruan tinggi mendukung pengetahuan; sementara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat menyediakan regulasi, konektivitas, standardisasi, dan pembiayaan yang melampaui kemampuan desa. Ketika satu aktor mengambil alih semua fungsi, sistem cenderung tidak efisien dan sulit dipertahankan.

Untuk melihat penerapannya, bayangkan sebuah desa yang memiliki satu komoditas unggulan tetapi pendapatan petani tetap rendah. Diagnosis mungkin menunjukkan bahwa masalah utama bukan kurangnya produksi, melainkan kualitas yang tidak seragam, kehilangan pascapanen, penjualan individual, dan biaya logistik. Solusi yang relevan bukan hanya subsidi input. Desa dapat mengembangkan standar panen, fasilitas pengumpulan, pencatatan mutu, pengolahan sederhana, kontrak dengan pembeli, dan pembiayaan modal kerja. Contoh ilustratif ini menunjukkan bahwa strategi pertumbuhan harus mengintervensi titik lemah yang benar-benar menentukan nilai tambah.

Mekanisme transmisi menuju kesejahteraan dapat dijelaskan sebagai rantai: investasi publik dan kelembagaan menurunkan biaya transaksi; penurunan biaya meningkatkan kelayakan usaha; usaha yang lebih layak mendorong investasi swasta dan adopsi teknologi; produktivitas yang meningkat memperbesar surplus; surplus memungkinkan upah, keuntungan, dan penerimaan lokal meningkat; peningkatan pendapatan memperkuat konsumsi, tabungan, pendidikan, kesehatan, dan aset rumah tangga. Rantai ini tidak otomatis. Bila pasar tenaga kerja lemah atau kekuatan tawar timpang, produktivitas dapat meningkat tanpa peningkatan pendapatan yang proporsional. Karena itu kualitas institusi pasar dan perlindungan sosial tetap penting.

8. Pertanian Produktif dan Transformasi dari Komoditas ke Nilai Tambah

Pertanian tetap menjadi basis ekonomi bagi banyak wilayah perdesaan, tetapi pertumbuhan desa tidak dapat hanya bergantung pada peningkatan volume komoditas primer. Harga komoditas mentah cenderung volatil dan posisi tawar petani sering lemah. Transformasi pertanian harus bergerak dari produksi ke produktivitas, dari komoditas ke produk, dan dari penjualan musiman ke pengelolaan rantai nilai. Secara konseptual, isu ini dapat dibaca melalui tiga lapis analisis. Pertama adalah lapis mikro, yaitu keputusan rumah tangga dan pelaku usaha tentang produksi, konsumsi, investasi, pendidikan, serta strategi menghadapi risiko. Kedua adalah lapis meso, yaitu kualitas pasar lokal, organisasi produsen, koperasi, BUM Desa, jejaring antardesa, dan hubungan dengan pembeli. Ketiga adalah lapis makro dan institusional, yaitu kebijakan fiskal, regulasi, sistem keuangan, perdagangan, konektivitas, dan kebijakan pembangunan wilayah. Ketiga lapis tersebut harus bergerak searah. Jika hanya satu lapis diperbaiki, hasilnya sering terbatas karena hambatan pada lapis lain tetap menahan produktivitas.

Peningkatan nilai tambah dapat dilakukan melalui benih unggul, mekanisasi yang sesuai skala, layanan penyuluhan, data cuaca, manajemen air, pascapanen, grading, pengolahan, pengemasan, sertifikasi, serta kontrak pemasaran. Digitalisasi dapat mendukung pencatatan usaha tani, prediksi permintaan, akses informasi harga, dan traceability. Dalam pendekatan ini petani diposisikan sebagai pelaku usaha yang mengambil keputusan berbasis data, bukan hanya produsen yang menunggu harga pasar. Implikasi kebijakannya adalah perlunya pergeseran dari pendekatan program menuju pendekatan sistem. Program biasanya dimulai dari anggaran dan jenis kegiatan; pendekatan sistem dimulai dari masalah, tujuan ekonomi, aktor, dan mekanisme perubahan. Pertanyaan utamanya bukan 'apa yang dapat dibelanjakan tahun ini', tetapi 'hambatan apa yang menghalangi warga meningkatkan produktivitas dan pendapatan, dan kombinasi intervensi apa yang paling masuk akal untuk mengatasinya'. Orientasi seperti ini mendorong koordinasi lintas sektor serta mengurangi proyek yang berdiri sendiri tanpa hubungan dengan rantai nilai.

Dalam perspektif ekonomi inklusif, perhatian juga harus diberikan pada distribusi manfaat. Pertumbuhan lokal dapat terjadi tetapi tetap eksklusif bila aset, kontrak, informasi, dan jaringan hanya dikuasai kelompok kecil. Karena itu desain kebijakan perlu memeriksa siapa yang memperoleh pekerjaan, siapa yang memiliki aset, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang memiliki suara dalam keputusan. Kelompok miskin, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, masyarakat adat, pekerja informal, serta rumah tangga di lokasi terpencil harus masuk dalam desain sejak awal. Inklusi bukan tambahan setelah pertumbuhan terjadi, melainkan bagian dari arsitektur pertumbuhan itu sendiri.

Dimensi lain adalah keberlanjutan. Peningkatan produksi yang menguras tanah, air, hutan, atau pesisir dapat menciptakan pendapatan sesaat tetapi memperbesar kerentanan di masa depan. Karena itu produktivitas perlu dipahami sebagai kemampuan menghasilkan nilai lebih besar dengan penggunaan

sumber daya yang lebih efisien dan risiko lingkungan yang lebih rendah. Investasi dalam efisiensi air, energi bersih, diversifikasi, agroforestri, pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, dan adaptasi iklim dapat diposisikan sebagai strategi ekonomi, bukan sekadar kewajiban lingkungan.

Dari sisi manajemen, keberhasilan memerlukan pembagian peran yang jelas. Pemerintah desa berfungsi sebagai pengarah, penyedia barang publik lokal, dan fasilitator; pelaku usaha menjalankan kegiatan komersial; kelompok masyarakat mengorganisasi partisipasi dan kontrol sosial; lembaga keuangan menyediakan modal; perguruan tinggi mendukung pengetahuan; sementara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat menyediakan regulasi, konektivitas, standardisasi, dan pembiayaan yang melampaui kemampuan desa. Ketika satu aktor mengambil alih semua fungsi, sistem cenderung tidak efisien dan sulit dipertahankan.

Untuk melihat penerapannya, bayangkan sebuah desa yang memiliki satu komoditas unggulan tetapi pendapatan petani tetap rendah. Diagnosis mungkin menunjukkan bahwa masalah utama bukan kurangnya produksi, melainkan kualitas yang tidak seragam, kehilangan pascapanen, penjualan individual, dan biaya logistik. Solusi yang relevan bukan hanya subsidi input. Desa dapat mengembangkan standar panen, fasilitas pengumpulan, pencatatan mutu, pengolahan sederhana, kontrak dengan pembeli, dan pembiayaan modal kerja. Contoh ilustratif ini menunjukkan bahwa strategi pertumbuhan harus mengintervensi titik lemah yang benar-benar menentukan nilai tambah.

Indikator operasional perlu disusun dalam dashboard sederhana. Pada sisi ekonomi dapat digunakan produktivitas per pekerja, omzet usaha, nilai tambah per kilogram produk, jumlah pelanggan di luar desa, proporsi produk yang diolah lokal, dan biaya logistik. Pada sisi sosial dapat digunakan pendapatan rumah tangga, kemiskinan, partisipasi perempuan dan pemuda, akses pelatihan, serta kualitas pekerjaan. Pada sisi lingkungan dapat digunakan tutupan vegetasi, kualitas air, efisiensi energi, pengelolaan sampah, dan risiko bencana. Pada sisi kelembagaan dapat digunakan transparansi anggaran, kualitas laporan usaha, tingkat partisipasi, dan penyelesaian pengaduan.

9. Hilirisasi Perdesaan dan Agroindustri Lokal

Hilirisasi tidak hanya relevan bagi mineral atau industri besar. Hilirisasi perdesaan berarti menahan sebagian nilai tambah di dekat sumber bahan baku melalui pengolahan yang ekonomis, ramah lingkungan, dan terhubung dengan pasar. Beras premium, tepung lokal, kopi sangrai, kakao olahan, produk kelapa, rempah, minyak atsiri, produk perikanan, makanan siap saji, furnitur, serta kerajinan merupakan contoh ruang hilirisasi yang dapat dikembangkan sesuai keunggulan lokal. Secara konseptual, isu ini dapat dibaca melalui tiga lapis analisis. Pertama adalah lapis mikro, yaitu keputusan rumah tangga dan pelaku usaha tentang produksi, konsumsi, investasi, pendidikan, serta strategi menghadapi risiko. Kedua adalah lapis meso, yaitu kualitas pasar lokal, organisasi produsen, koperasi, BUM Desa, jejaring antardesa, dan hubungan dengan pembeli. Ketiga adalah lapis makro dan institusional, yaitu kebijakan fiskal, regulasi, sistem keuangan, perdagangan, konektivitas, dan kebijakan pembangunan wilayah. Ketiga lapis tersebut harus bergerak searah. Jika hanya satu lapis diperbaiki, hasilnya sering terbatas karena hambatan pada lapis lain tetap menahan produktivitas.

Kunci hilirisasi adalah skala yang tepat. Tidak semua desa memerlukan pabrik sendiri. Dalam banyak kasus, fasilitas pengolahan bersama di tingkat kecamatan atau klaster antardesa lebih efisien. Model hub-and-spoke memungkinkan beberapa desa berfungsi sebagai pemasok yang memenuhi standar, sementara

pusat pengolahan menyediakan teknologi, laboratorium, pengemasan, logistik, dan pemasaran. Pendekatan ini mengurangi duplikasi investasi dan memperkuat spesialisasi. Implikasi kebijakannya adalah perlunya pergeseran dari pendekatan program menuju pendekatan sistem. Program biasanya dimulai dari anggaran dan jenis kegiatan; pendekatan sistem dimulai dari masalah, tujuan ekonomi, aktor, dan mekanisme perubahan. Pertanyaan utamanya bukan 'apa yang dapat dibelanjakan tahun ini', tetapi 'hambatan apa yang menghalangi warga meningkatkan produktivitas dan pendapatan, dan kombinasi intervensi apa yang paling masuk akal untuk mengatasinya'. Orientasi seperti ini mendorong koordinasi lintas sektor serta mengurangi proyek yang berdiri sendiri tanpa hubungan dengan rantai nilai.

Dalam perspektif ekonomi inklusif, perhatian juga harus diberikan pada distribusi manfaat. Pertumbuhan lokal dapat terjadi tetapi tetap eksklusif bila aset, kontrak, informasi, dan jaringan hanya dikuasai kelompok kecil. Karena itu desain kebijakan perlu memeriksa siapa yang memperoleh pekerjaan, siapa yang memiliki aset, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang memiliki suara dalam keputusan. Kelompok miskin, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, masyarakat adat, pekerja informal, serta rumah tangga di lokasi terpencil harus masuk dalam desain sejak awal. Inklusi bukan tambahan setelah pertumbuhan terjadi, melainkan bagian dari arsitektur pertumbuhan itu sendiri.

Dimensi lain adalah keberlanjutan. Peningkatan produksi yang menguras tanah, air, hutan, atau pesisir dapat menciptakan pendapatan sesaat tetapi memperbesar kerentanan di masa depan. Karena itu produktivitas perlu dipahami sebagai kemampuan menghasilkan nilai lebih besar dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan risiko lingkungan yang lebih rendah. Investasi dalam efisiensi air, energi bersih, diversifikasi, agroforestri, pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, dan adaptasi iklim dapat diposisikan sebagai strategi ekonomi, bukan sekadar kewajiban lingkungan.

Dari sisi manajemen, keberhasilan memerlukan pembagian peran yang jelas. Pemerintah desa berfungsi sebagai pengarah, penyedia barang publik lokal, dan fasilitator; pelaku usaha menjalankan kegiatan komersial; kelompok masyarakat mengorganisasi partisipasi dan kontrol sosial; lembaga keuangan menyediakan modal; perguruan tinggi mendukung pengetahuan; sementara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat menyediakan regulasi, konektivitas, standardisasi, dan pembiayaan yang melampaui kemampuan desa. Ketika satu aktor mengambil alih semua fungsi, sistem cenderung tidak efisien dan sulit dipertahankan.

Untuk melihat penerapannya, bayangkan sebuah desa yang memiliki satu komoditas unggulan tetapi pendapatan petani tetap rendah. Diagnosis mungkin menunjukkan bahwa masalah utama bukan kurangnya produksi, melainkan kualitas yang tidak seragam, kehilangan pascapanen, penjualan individual, dan biaya logistik. Solusi yang relevan bukan hanya subsidi input. Desa dapat mengembangkan standar panen, fasilitas pengumpulan, pencatatan mutu, pengolahan sederhana, kontrak dengan pembeli, dan pembiayaan modal kerja. Contoh ilustratif ini menunjukkan bahwa strategi pertumbuhan harus mengintervensi titik lemah yang benar-benar menentukan nilai tambah.

Setiap strategi perlu menyertakan risk register. Risiko pasar mencakup turunnya harga dan hilangnya pembeli; risiko produksi mencakup cuaca, penyakit, dan kegagalan teknologi; risiko finansial mencakup arus kas dan utang; risiko kelembagaan mencakup konflik kepentingan dan pergantian kepemimpinan; risiko sosial mencakup eksklusi kelompok lemah; risiko lingkungan mencakup degradasi sumber daya; dan risiko digital mencakup kebocoran data serta penipuan. Menyebut risiko bukan alasan untuk tidak berinovasi, tetapi cara agar inovasi dilakukan dengan disiplin.

10. Konektivitas Fisik: Jalan, Logistik, dan Akses Pasar

Jarak ekonomi tidak selalu sama dengan jarak geografis. Sebuah desa dapat berjarak relatif dekat dari kota, tetapi tetap terisolasi bila jalan buruk, biaya angkut tinggi, jadwal transportasi tidak pasti, atau rantai dingin tidak tersedia. Konektivitas fisik menentukan berapa banyak nilai produk yang hilang sebelum sampai ke konsumen dan berapa mahal input yang harus dibeli produsen. Secara konseptual, isu ini dapat dibaca melalui tiga lapis analisis. Pertama adalah lapis mikro, yaitu keputusan rumah tangga dan pelaku usaha tentang produksi, konsumsi, investasi, pendidikan, serta strategi menghadapi risiko. Kedua adalah lapis meso, yaitu kualitas pasar lokal, organisasi produsen, koperasi, BUM Desa, jejaring antardesa, dan hubungan dengan pembeli. Ketiga adalah lapis makro dan institusional, yaitu kebijakan fiskal, regulasi, sistem keuangan, perdagangan, konektivitas, dan kebijakan pembangunan wilayah. Ketiga lapis tersebut harus bergerak searah. Jika hanya satu lapis diperbaiki, hasilnya sering terbatas karena hambatan pada lapis lain tetap menahan produktivitas.

Perencanaan logistik desa perlu memetakan titik produksi, volume, musim, tujuan pasar, jenis kendaraan, fasilitas penyimpanan, dan peluang konsolidasi muatan. Jalan desa harus dihubungkan dengan jalan kabupaten, pelabuhan, stasiun, pasar induk, dan pusat distribusi. Investasi transportasi yang terkoordinasi dapat memperbesar wilayah pasar efektif dan membuat usaha lokal lebih layak secara ekonomi. Implikasi kebijakannya adalah perlunya pergeseran dari pendekatan program menuju pendekatan sistem. Program biasanya dimulai dari anggaran dan jenis kegiatan; pendekatan sistem dimulai dari masalah, tujuan ekonomi, aktor, dan mekanisme perubahan. Pertanyaan utamanya bukan 'apa yang dapat dibelanjakan tahun ini', tetapi 'hambatan apa yang menghalangi warga meningkatkan produktivitas dan pendapatan, dan kombinasi intervensi apa yang paling masuk akal untuk mengatasinya'. Orientasi seperti ini mendorong koordinasi lintas sektor serta mengurangi proyek yang berdiri sendiri tanpa hubungan dengan rantai nilai.

Dalam perspektif ekonomi inklusif, perhatian juga harus diberikan pada distribusi manfaat. Pertumbuhan lokal dapat terjadi tetapi tetap eksklusif bila aset, kontrak, informasi, dan jaringan hanya dikuasai kelompok kecil. Karena itu desain kebijakan perlu memeriksa siapa yang memperoleh pekerjaan, siapa yang memiliki aset, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang memiliki suara dalam keputusan. Kelompok miskin, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, masyarakat adat, pekerja informal, serta rumah tangga di lokasi terpencil harus masuk dalam desain sejak awal. Inklusi bukan tambahan setelah pertumbuhan terjadi, melainkan bagian dari arsitektur pertumbuhan itu sendiri.

Dimensi lain adalah keberlanjutan. Peningkatan produksi yang menguras tanah, air, hutan, atau pesisir dapat menciptakan pendapatan sesaat tetapi memperbesar kerentanan di masa depan. Karena itu produktivitas perlu dipahami sebagai kemampuan menghasilkan nilai lebih besar dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan risiko lingkungan yang lebih rendah. Investasi dalam efisiensi air, energi bersih, diversifikasi, agroforestri, pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, dan adaptasi iklim dapat diposisikan sebagai strategi ekonomi, bukan sekadar kewajiban lingkungan.

Dari sisi manajemen, keberhasilan memerlukan pembagian peran yang jelas. Pemerintah desa berfungsi sebagai pengarah, penyedia barang publik lokal, dan fasilitator; pelaku usaha menjalankan kegiatan komersial; kelompok masyarakat mengorganisasi partisipasi dan kontrol sosial; lembaga keuangan menyediakan modal; perguruan tinggi mendukung pengetahuan; sementara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat menyediakan regulasi, konektivitas, standardisasi, dan pembiayaan yang melampaui kemampuan desa. Ketika satu aktor mengambil alih semua fungsi, sistem cenderung tidak efisien dan sulit dipertahankan.

Untuk melihat penerapannya, bayangkan sebuah desa yang memiliki satu komoditas unggulan tetapi pendapatan petani tetap rendah. Diagnosis mungkin menunjukkan bahwa masalah utama bukan kurangnya produksi, melainkan kualitas yang tidak seragam, kehilangan pascapanen, penjualan individual, dan biaya logistik. Solusi yang relevan bukan hanya subsidi input. Desa dapat mengembangkan standar panen, fasilitas pengumpulan, pencatatan mutu, pengolahan sederhana, kontrak dengan pembeli, dan pembiayaan modal kerja. Contoh ilustratif ini menunjukkan bahwa strategi pertumbuhan harus mengintervensi titik lemah yang benar-benar menentukan nilai tambah.

Mekanisme transmisi menuju kesejahteraan dapat dijelaskan sebagai rantai: investasi publik dan kelembagaan menurunkan biaya transaksi; penurunan biaya meningkatkan kelayakan usaha; usaha yang lebih layak mendorong investasi swasta dan adopsi teknologi; produktivitas yang meningkat memperbesar surplus; surplus memungkinkan upah, keuntungan, dan penerimaan lokal meningkat; peningkatan pendapatan memperkuat konsumsi, tabungan, pendidikan, kesehatan, dan aset rumah tangga. Rantai ini tidak otomatis. Bila pasar tenaga kerja lemah atau kekuatan tawar timpang, produktivitas dapat meningkat tanpa peningkatan pendapatan yang proporsional. Karena itu kualitas institusi pasar dan perlindungan sosial tetap penting.

11. Konektivitas Digital dan Desa dalam Ekonomi Platform

Internet berkecepatan memadai telah berubah dari fasilitas tambahan menjadi infrastruktur ekonomi. Konektivitas digital memungkinkan desa mengakses pasar, pendidikan, layanan keuangan, layanan publik, telemedicine, informasi cuaca, serta jaringan profesional. Namun akses internet saja tidak menghasilkan transformasi jika literasi digital, perangkat, kepercayaan, keamanan siber, dan kemampuan bisnis masih lemah. Secara konseptual, isu ini dapat dibaca melalui tiga lapis analisis. Pertama adalah lapis mikro, yaitu keputusan rumah tangga dan pelaku usaha tentang produksi, konsumsi, investasi, pendidikan, serta strategi menghadapi risiko. Kedua adalah lapis meso, yaitu kualitas pasar lokal, organisasi produsen, koperasi, BUM Desa, jejaring antardesa, dan hubungan dengan pembeli. Ketiga adalah lapis makro dan institusional, yaitu kebijakan fiskal, regulasi, sistem keuangan, perdagangan, konektivitas, dan kebijakan pembangunan wilayah. Ketiga lapis tersebut harus bergerak searah. Jika hanya satu lapis diperbaiki, hasilnya sering terbatas karena hambatan pada lapis lain tetap menahan produktivitas.

Strategi desa digital perlu membedakan antara digitalisasi administratif dan digitalisasi produktif. Administrasi digital meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan, sementara digitalisasi produktif membantu pelaku ekonomi memperoleh pendapatan. Marketplace, pembayaran digital, pencatatan keuangan, promosi berbasis media sosial, sistem inventori, analitik sederhana, dan penggunaan AI untuk desain atau pelayanan pelanggan dapat menjadi jembatan menuju produktivitas yang lebih tinggi. Implikasi kebijakannya adalah perlunya pergeseran dari pendekatan program menuju pendekatan sistem. Program biasanya dimulai dari anggaran dan jenis kegiatan; pendekatan sistem dimulai dari masalah, tujuan ekonomi, aktor, dan mekanisme perubahan. Pertanyaan utamanya bukan 'apa yang dapat dibelanjakan tahun ini', tetapi 'hambatan apa yang menghalangi warga meningkatkan produktivitas dan pendapatan, dan kombinasi intervensi apa yang paling masuk akal untuk mengatasinya'. Orientasi seperti ini mendorong koordinasi lintas sektor serta mengurangi proyek yang berdiri sendiri tanpa hubungan dengan rantai nilai.

Dalam perspektif ekonomi inklusif, perhatian juga harus diberikan pada distribusi manfaat. Pertumbuhan lokal dapat terjadi tetapi tetap eksklusif bila aset, kontrak, informasi, dan jaringan hanya dikuasai kelompok kecil. Karena itu desain kebijakan perlu memeriksa siapa yang memperoleh pekerjaan, siapa yang memiliki

aset, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang memiliki suara dalam keputusan. Kelompok miskin, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, masyarakat adat, pekerja informal, serta rumah tangga di lokasi terpencil harus masuk dalam desain sejak awal. Inklusi bukan tambahan setelah pertumbuhan terjadi, melainkan bagian dari arsitektur pertumbuhan itu sendiri.

Dimensi lain adalah keberlanjutan. Peningkatan produksi yang menguras tanah, air, hutan, atau pesisir dapat menciptakan pendapatan sesaat tetapi memperbesar kerentanan di masa depan. Karena itu produktivitas perlu dipahami sebagai kemampuan menghasilkan nilai lebih besar dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan risiko lingkungan yang lebih rendah. Investasi dalam efisiensi air, energi bersih, diversifikasi, agroforestri, pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, dan adaptasi iklim dapat diposisikan sebagai strategi ekonomi, bukan sekadar kewajiban lingkungan.

Dari sisi manajemen, keberhasilan memerlukan pembagian peran yang jelas. Pemerintah desa berfungsi sebagai pengarah, penyedia barang publik lokal, dan fasilitator; pelaku usaha menjalankan kegiatan komersial; kelompok masyarakat mengorganisasi partisipasi dan kontrol sosial; lembaga keuangan menyediakan modal; perguruan tinggi mendukung pengetahuan; sementara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat menyediakan regulasi, konektivitas, standardisasi, dan pembiayaan yang melampaui kemampuan desa. Ketika satu aktor mengambil alih semua fungsi, sistem cenderung tidak efisien dan sulit dipertahankan.

Untuk melihat penerapannya, bayangkan sebuah desa yang memiliki satu komoditas unggulan tetapi pendapatan petani tetap rendah. Diagnosis mungkin menunjukkan bahwa masalah utama bukan kurangnya produksi, melainkan kualitas yang tidak seragam, kehilangan pascapanen, penjualan individual, dan biaya logistik. Solusi yang relevan bukan hanya subsidi input. Desa dapat mengembangkan standar panen, fasilitas pengumpulan, pencatatan mutu, pengolahan sederhana, kontrak dengan pembeli, dan pembiayaan modal kerja. Contoh ilustratif ini menunjukkan bahwa strategi pertumbuhan harus mengintervensi titik lemah yang benar-benar menentukan nilai tambah.

Indikator operasional perlu disusun dalam dashboard sederhana. Pada sisi ekonomi dapat digunakan produktivitas per pekerja, omzet usaha, nilai tambah per kilogram produk, jumlah pelanggan di luar desa, proporsi produk yang diolah lokal, dan biaya logistik. Pada sisi sosial dapat digunakan pendapatan rumah tangga, kemiskinan, partisipasi perempuan dan pemuda, akses pelatihan, serta kualitas pekerjaan. Pada sisi lingkungan dapat digunakan tutupan vegetasi, kualitas air, efisiensi energi, pengelolaan sampah, dan risiko bencana. Pada sisi kelembagaan dapat digunakan transparansi anggaran, kualitas laporan usaha, tingkat partisipasi, dan penyelesaian pengaduan.

12. SDM Desa: Pendidikan, Reskilling, dan Upskilling

Modal manusia merupakan faktor pembeda antara desa yang hanya memiliki potensi dan desa yang mampu mengkomersialisasikan potensi secara berkelanjutan. Pendidikan dasar yang kuat, kesehatan, gizi, keterampilan teknis, kemampuan manajerial, dan literasi digital menentukan kemampuan masyarakat mengadopsi teknologi dan membangun usaha. Secara konseptual, isu ini dapat dibaca melalui tiga lapis analisis. Pertama adalah lapis mikro, yaitu keputusan rumah tangga dan pelaku usaha tentang produksi, konsumsi, investasi, pendidikan, serta strategi menghadapi risiko. Kedua adalah lapis meso, yaitu kualitas pasar lokal, organisasi produsen, koperasi, BUM Desa, jejaring antardesa, dan hubungan dengan pembeli. Ketiga adalah lapis makro dan institusional, yaitu kebijakan fiskal, regulasi, sistem keuangan, perdagangan,

konektivitas, dan kebijakan pembangunan wilayah. Ketiga lapis tersebut harus bergerak searah. Jika hanya satu lapis diperbaiki, hasilnya sering terbatas karena hambatan pada lapis lain tetap menahan produktivitas.

Pelatihan harus berbasis permintaan nyata. Kurikulum untuk operator mesin pengolahan, teknisi alat pertanian, pemasaran digital, akuntansi UMKM, pemandu wisata, pengelola homestay, budidaya modern, atau energi terbarukan harus terkait dengan peluang kerja yang tersedia. Kerja sama antara pemerintah desa, SMK, perguruan tinggi, balai latihan, perusahaan, dan asosiasi industri dapat membangun jalur keterampilan yang lebih relevan. Implikasi kebijakannya adalah perlunya pergeseran dari pendekatan program menuju pendekatan sistem. Program biasanya dimulai dari anggaran dan jenis kegiatan; pendekatan sistem dimulai dari masalah, tujuan ekonomi, aktor, dan mekanisme perubahan. Pertanyaan utamanya bukan 'apa yang dapat dibelanjakan tahun ini', tetapi 'hambatan apa yang menghalangi warga meningkatkan produktivitas dan pendapatan, dan kombinasi intervensi apa yang paling masuk akal untuk mengatasinya'. Orientasi seperti ini mendorong koordinasi lintas sektor serta mengurangi proyek yang berdiri sendiri tanpa hubungan dengan rantai nilai.

Dalam perspektif ekonomi inklusif, perhatian juga harus diberikan pada distribusi manfaat. Pertumbuhan lokal dapat terjadi tetapi tetap eksklusif bila aset, kontrak, informasi, dan jaringan hanya dikuasai kelompok kecil. Karena itu desain kebijakan perlu memeriksa siapa yang memperoleh pekerjaan, siapa yang memiliki aset, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang memiliki suara dalam keputusan. Kelompok miskin, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, masyarakat adat, pekerja informal, serta rumah tangga di lokasi terpencil harus masuk dalam desain sejak awal. Inklusi bukan tambahan setelah pertumbuhan terjadi, melainkan bagian dari arsitektur pertumbuhan itu sendiri.

Dimensi lain adalah keberlanjutan. Peningkatan produksi yang menguras tanah, air, hutan, atau pesisir dapat menciptakan pendapatan sesaat tetapi memperbesar kerentanan di masa depan. Karena itu produktivitas perlu dipahami sebagai kemampuan menghasilkan nilai lebih besar dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan risiko lingkungan yang lebih rendah. Investasi dalam efisiensi air, energi bersih, diversifikasi, agroforestri, pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, dan adaptasi iklim dapat diposisikan sebagai strategi ekonomi, bukan sekadar kewajiban lingkungan.

Dari sisi manajemen, keberhasilan memerlukan pembagian peran yang jelas. Pemerintah desa berfungsi sebagai pengarah, penyedia barang publik lokal, dan fasilitator; pelaku usaha menjalankan kegiatan komersial; kelompok masyarakat mengorganisasi partisipasi dan kontrol sosial; lembaga keuangan menyediakan modal; perguruan tinggi mendukung pengetahuan; sementara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat menyediakan regulasi, konektivitas, standardisasi, dan pembiayaan yang melampaui kemampuan desa. Ketika satu aktor mengambil alih semua fungsi, sistem cenderung tidak efisien dan sulit dipertahankan.

Untuk melihat penerapannya, bayangkan sebuah desa yang memiliki satu komoditas unggulan tetapi pendapatan petani tetap rendah. Diagnosis mungkin menunjukkan bahwa masalah utama bukan kurangnya produksi, melainkan kualitas yang tidak seragam, kehilangan pascapanen, penjualan individual, dan biaya logistik. Solusi yang relevan bukan hanya subsidi input. Desa dapat mengembangkan standar panen, fasilitas pengumpulan, pencatatan mutu, pengolahan sederhana, kontrak dengan pembeli, dan pembiayaan modal kerja. Contoh ilustratif ini menunjukkan bahwa strategi pertumbuhan harus mengintervensi titik lemah yang benar-benar menentukan nilai tambah.

Setiap strategi perlu menyertakan risk register. Risiko pasar mencakup turunnya harga dan hilangnya pembeli; risiko produksi mencakup cuaca, penyakit, dan kegagalan teknologi; risiko finansial mencakup

arus kas dan utang; risiko kelembagaan mencakup konflik kepentingan dan pergantian kepemimpinan; risiko sosial mencakup eksklusi kelompok lemah; risiko lingkungan mencakup degradasi sumber daya; dan risiko digital mencakup kebocoran data serta penipuan. Menyebut risiko bukan alasan untuk tidak berinovasi, tetapi cara agar inovasi dilakukan dengan disiplin.

13. Pemuda Desa dan Regenerasi Ekonomi Perdesaan

Salah satu risiko terbesar perdesaan adalah keluarnya generasi muda tanpa terbentuknya pengganti wirausaha dan tenaga terampil. Migrasi bukan sesuatu yang harus dicegah, tetapi desa perlu menyediakan pilihan agar pemuda dapat tinggal atau kembali secara sukarela karena terdapat pekerjaan dan kualitas hidup yang layak. Ekonomi desa baru harus menyediakan ruang bagi profesi yang lebih beragam: teknisi, desainer, analis data sederhana, pengelola media sosial, pengolah pangan, operator drone, pengusaha wisata, dan tenaga layanan. Secara konseptual, isu ini dapat dibaca melalui tiga lapis analisis. Pertama adalah lapis mikro, yaitu keputusan rumah tangga dan pelaku usaha tentang produksi, konsumsi, investasi, pendidikan, serta strategi menghadapi risiko. Kedua adalah lapis meso, yaitu kualitas pasar lokal, organisasi produsen, koperasi, BUM Desa, jejaring antardesa, dan hubungan dengan pembeli. Ketiga adalah lapis makro dan institusional, yaitu kebijakan fiskal, regulasi, sistem keuangan, perdagangan, konektivitas, dan kebijakan pembangunan wilayah. Ketiga lapis tersebut harus bergerak searah. Jika hanya satu lapis diperbaiki, hasilnya sering terbatas karena hambatan pada lapis lain tetap menahan produktivitas.

Program untuk pemuda harus menggabungkan modal, keterampilan, ruang bereksperimen, dan akses pasar. Kompetisi bisnis tanpa mentoring jarang cukup. Inkubator desa, makerspace, co-working, kemitraan kampus, dan proyek inovasi berbasis masalah lokal dapat menciptakan ekosistem yang membuat kreativitas pemuda relevan dengan kebutuhan wilayah. Implikasi kebijakannya adalah perlunya pergeseran dari pendekatan program menuju pendekatan sistem. Program biasanya dimulai dari anggaran dan jenis kegiatan; pendekatan sistem dimulai dari masalah, tujuan ekonomi, aktor, dan mekanisme perubahan. Pertanyaan utamanya bukan 'apa yang dapat dibelanjakan tahun ini', tetapi 'hambatan apa yang menghalangi warga meningkatkan produktivitas dan pendapatan, dan kombinasi intervensi apa yang paling masuk akal untuk mengatasinya'. Orientasi seperti ini mendorong koordinasi lintas sektor serta mengurangi proyek yang berdiri sendiri tanpa hubungan dengan rantai nilai.

Dalam perspektif ekonomi inklusif, perhatian juga harus diberikan pada distribusi manfaat. Pertumbuhan lokal dapat terjadi tetapi tetap eksklusif bila aset, kontrak, informasi, dan jaringan hanya dikuasai kelompok kecil. Karena itu desain kebijakan perlu memeriksa siapa yang memperoleh pekerjaan, siapa yang memiliki aset, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang memiliki suara dalam keputusan. Kelompok miskin, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, masyarakat adat, pekerja informal, serta rumah tangga di lokasi terpencil harus masuk dalam desain sejak awal. Inklusi bukan tambahan setelah pertumbuhan terjadi, melainkan bagian dari arsitektur pertumbuhan itu sendiri.

Dimensi lain adalah keberlanjutan. Peningkatan produksi yang menguras tanah, air, hutan, atau pesisir dapat menciptakan pendapatan sesaat tetapi memperbesar kerentanan di masa depan. Karena itu produktivitas perlu dipahami sebagai kemampuan menghasilkan nilai lebih besar dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan risiko lingkungan yang lebih rendah. Investasi dalam efisiensi air, energi bersih, diversifikasi, agroforestri, pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, dan adaptasi iklim dapat diposisikan sebagai strategi ekonomi, bukan sekadar kewajiban lingkungan.

Dari sisi manajemen, keberhasilan memerlukan pembagian peran yang jelas. Pemerintah desa berfungsi sebagai pengarah, penyedia barang publik lokal, dan fasilitator; pelaku usaha menjalankan kegiatan komersial; kelompok masyarakat mengorganisasi partisipasi dan kontrol sosial; lembaga keuangan menyediakan modal; perguruan tinggi mendukung pengetahuan; sementara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat menyediakan regulasi, konektivitas, standardisasi, dan pembiayaan yang melampaui kemampuan desa. Ketika satu aktor mengambil alih semua fungsi, sistem cenderung tidak efisien dan sulit dipertahankan.

Untuk melihat penerapannya, bayangkan sebuah desa yang memiliki satu komoditas unggulan tetapi pendapatan petani tetap rendah. Diagnosis mungkin menunjukkan bahwa masalah utama bukan kurangnya produksi, melainkan kualitas yang tidak seragam, kehilangan pascapanen, penjualan individual, dan biaya logistik. Solusi yang relevan bukan hanya subsidi input. Desa dapat mengembangkan standar panen, fasilitas pengumpulan, pencatatan mutu, pengolahan sederhana, kontrak dengan pembeli, dan pembiayaan modal kerja. Contoh ilustratif ini menunjukkan bahwa strategi pertumbuhan harus mengintervensi titik lemah yang benar-benar menentukan nilai tambah.

Mekanisme transmisi menuju kesejahteraan dapat dijelaskan sebagai rantai: investasi publik dan kelembagaan menurunkan biaya transaksi; penurunan biaya meningkatkan kelayakan usaha; usaha yang lebih layak mendorong investasi swasta dan adopsi teknologi; produktivitas yang meningkat memperbesar surplus; surplus memungkinkan upah, keuntungan, dan penerimaan lokal meningkat; peningkatan pendapatan memperkuat konsumsi, tabungan, pendidikan, kesehatan, dan aset rumah tangga. Rantai ini tidak otomatis. Bila pasar tenaga kerja lemah atau kekuatan tawar timpang, produktivitas dapat meningkat tanpa peningkatan pendapatan yang proporsional. Karena itu kualitas institusi pasar dan perlindungan sosial tetap penting.

14. Perempuan sebagai Penggerak Ekonomi Desa

Perempuan memainkan peran besar dalam produksi pangan, perdagangan kecil, pengolahan rumah tangga, pengelolaan keuangan keluarga, serta kegiatan sosial desa. Akan tetapi kontribusi tersebut sering tidak sepenuhnya tercermin dalam kepemilikan aset, akses kredit, posisi pengambilan keputusan, atau perlindungan sosial. Pertumbuhan desa yang inklusif harus mengurangi hambatan waktu, mobilitas, informasi, dan norma yang membatasi partisipasi ekonomi perempuan. Secara konseptual, isu ini dapat dibaca melalui tiga lapis analisis. Pertama adalah lapis mikro, yaitu keputusan rumah tangga dan pelaku usaha tentang produksi, konsumsi, investasi, pendidikan, serta strategi menghadapi risiko. Kedua adalah lapis meso, yaitu kualitas pasar lokal, organisasi produsen, koperasi, BUM Desa, jejaring antardesa, dan hubungan dengan pembeli. Ketiga adalah lapis makro dan institusional, yaitu kebijakan fiskal, regulasi, sistem keuangan, perdagangan, konektivitas, dan kebijakan pembangunan wilayah. Ketiga lapis tersebut harus bergerak searah. Jika hanya satu lapis diperbaiki, hasilnya sering terbatas karena hambatan pada lapis lain tetap menahan produktivitas.

Intervensi yang efektif mencakup layanan pengasuhan, jadwal pelatihan yang fleksibel, akses digital, kelompok usaha, kepemilikan rekening, literasi keuangan, dan penguatan posisi dalam rantai nilai. Pengalaman perhutanan sosial yang didukung Bank Dunia menunjukkan bagaimana kelompok perempuan dapat mengembangkan produk bernilai tambah dan memperoleh akses pasar ketika memperoleh pengetahuan, alat, serta hak pengelolaan yang jelas. Implikasi kebijakannya adalah perlunya pergeseran dari pendekatan program menuju pendekatan sistem. Program biasanya dimulai dari anggaran dan jenis

kegiatan; pendekatan sistem dimulai dari masalah, tujuan ekonomi, aktor, dan mekanisme perubahan. Pertanyaan utamanya bukan 'apa yang dapat dibelanjakan tahun ini', tetapi 'hambatan apa yang menghalangi warga meningkatkan produktivitas dan pendapatan, dan kombinasi intervensi apa yang paling masuk akal untuk mengatasinya'. Orientasi seperti ini mendorong koordinasi lintas sektor serta mengurangi proyek yang berdiri sendiri tanpa hubungan dengan rantai nilai.

Dalam perspektif ekonomi inklusif, perhatian juga harus diberikan pada distribusi manfaat. Pertumbuhan lokal dapat terjadi tetapi tetap eksklusif bila aset, kontrak, informasi, dan jaringan hanya dikuasai kelompok kecil. Karena itu desain kebijakan perlu memeriksa siapa yang memperoleh pekerjaan, siapa yang memiliki aset, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang memiliki suara dalam keputusan. Kelompok miskin, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, masyarakat adat, pekerja informal, serta rumah tangga di lokasi terpencil harus masuk dalam desain sejak awal. Inklusi bukan tambahan setelah pertumbuhan terjadi, melainkan bagian dari arsitektur pertumbuhan itu sendiri.

Dimensi lain adalah keberlanjutan. Peningkatan produksi yang menguras tanah, air, hutan, atau pesisir dapat menciptakan pendapatan sesaat tetapi memperbesar kerentanan di masa depan. Karena itu produktivitas perlu dipahami sebagai kemampuan menghasilkan nilai lebih besar dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan risiko lingkungan yang lebih rendah. Investasi dalam efisiensi air, energi bersih, diversifikasi, agroforestri, pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, dan adaptasi iklim dapat diposisikan sebagai strategi ekonomi, bukan sekadar kewajiban lingkungan.

Dari sisi manajemen, keberhasilan memerlukan pembagian peran yang jelas. Pemerintah desa berfungsi sebagai pengarah, penyedia barang publik lokal, dan fasilitator; pelaku usaha menjalankan kegiatan komersial; kelompok masyarakat mengorganisasi partisipasi dan kontrol sosial; lembaga keuangan menyediakan modal; perguruan tinggi mendukung pengetahuan; sementara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat menyediakan regulasi, konektivitas, standardisasi, dan pembiayaan yang melampaui kemampuan desa. Ketika satu aktor mengambil alih semua fungsi, sistem cenderung tidak efisien dan sulit dipertahankan.

Untuk melihat penerapannya, bayangkan sebuah desa yang memiliki satu komoditas unggulan tetapi pendapatan petani tetap rendah. Diagnosis mungkin menunjukkan bahwa masalah utama bukan kurangnya produksi, melainkan kualitas yang tidak seragam, kehilangan pascapanen, penjualan individual, dan biaya logistik. Solusi yang relevan bukan hanya subsidi input. Desa dapat mengembangkan standar panen, fasilitas pengumpulan, pencatatan mutu, pengolahan sederhana, kontrak dengan pembeli, dan pembiayaan modal kerja. Contoh ilustratif ini menunjukkan bahwa strategi pertumbuhan harus mengintervensi titik lemah yang benar-benar menentukan nilai tambah.

Indikator operasional perlu disusun dalam dashboard sederhana. Pada sisi ekonomi dapat digunakan produktivitas per pekerja, omzet usaha, nilai tambah per kilogram produk, jumlah pelanggan di luar desa, proporsi produk yang diolah lokal, dan biaya logistik. Pada sisi sosial dapat digunakan pendapatan rumah tangga, kemiskinan, partisipasi perempuan dan pemuda, akses pelatihan, serta kualitas pekerjaan. Pada sisi lingkungan dapat digunakan tutupan vegetasi, kualitas air, efisiensi energi, pengelolaan sampah, dan risiko bencana. Pada sisi kelembagaan dapat digunakan transparansi anggaran, kualitas laporan usaha, tingkat partisipasi, dan penyelesaian pengaduan.

15. Perhutanan Sosial, Agroforestri, dan Ekonomi Berbasis Alam

Banyak desa Indonesia berada di sekitar kawasan hutan, pesisir, mangrove, dan lanskap bernilai ekologis tinggi. Model pertumbuhan konvensional yang mengandalkan eksploitasi sumber daya dapat meningkatkan pendapatan jangka pendek tetapi merusak fondasi ekonomi jangka panjang. Perhutanan sosial dan ekonomi berbasis alam menawarkan pendekatan yang menggabungkan legalitas akses, mata pencaharian, konservasi, dan nilai tambah lokal. Secara konseptual, isu ini dapat dibaca melalui tiga lapis analisis. Pertama adalah lapis mikro, yaitu keputusan rumah tangga dan pelaku usaha tentang produksi, konsumsi, investasi, pendidikan, serta strategi menghadapi risiko. Kedua adalah lapis meso, yaitu kualitas pasar lokal, organisasi produsen, koperasi, BUM Desa, jejaring antardesa, dan hubungan dengan pembeli. Ketiga adalah lapis makro dan institusional, yaitu kebijakan fiskal, regulasi, sistem keuangan, perdagangan, konektivitas, dan kebijakan pembangunan wilayah. Ketiga lapis tersebut harus bergerak searah. Jika hanya satu lapis diperbaiki, hasilnya sering terbatas karena hambatan pada lapis lain tetap menahan produktivitas.

Contoh yang didokumentasikan Bank Dunia pada 2026 menunjukkan bagaimana dukungan peralatan, penguatan kelompok, akses legal, dan pemasaran dapat meningkatkan produksi rotan, pengolahan jahe merah, pembibitan mangrove, agroforestri, serta partisipasi perempuan. Pelajaran utamanya adalah bahwa aset ekologis dapat menjadi aset produktif ketika hak, keterampilan, teknologi, dan pasar diorganisasikan secara terpadu. Implikasi kebijakannya adalah perlunya pergeseran dari pendekatan program menuju pendekatan sistem. Program biasanya dimulai dari anggaran dan jenis kegiatan; pendekatan sistem dimulai dari masalah, tujuan ekonomi, aktor, dan mekanisme perubahan. Pertanyaan utamanya bukan 'apa yang dapat dibelanjakan tahun ini', tetapi 'hambatan apa yang menghalangi warga meningkatkan produktivitas dan pendapatan, dan kombinasi intervensi apa yang paling masuk akal untuk mengatasinya'. Orientasi seperti ini mendorong koordinasi lintas sektor serta mengurangi proyek yang berdiri sendiri tanpa hubungan dengan rantai nilai.

Dalam perspektif ekonomi inklusif, perhatian juga harus diberikan pada distribusi manfaat. Pertumbuhan lokal dapat terjadi tetapi tetap eksklusif bila aset, kontrak, informasi, dan jaringan hanya dikuasai kelompok kecil. Karena itu desain kebijakan perlu memeriksa siapa yang memperoleh pekerjaan, siapa yang memiliki aset, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang memiliki suara dalam keputusan. Kelompok miskin, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, masyarakat adat, pekerja informal, serta rumah tangga di lokasi terpencil harus masuk dalam desain sejak awal. Inklusi bukan tambahan setelah pertumbuhan terjadi, melainkan bagian dari arsitektur pertumbuhan itu sendiri.

Dimensi lain adalah keberlanjutan. Peningkatan produksi yang menguras tanah, air, hutan, atau pesisir dapat menciptakan pendapatan sesaat tetapi memperbesar kerentanan di masa depan. Karena itu produktivitas perlu dipahami sebagai kemampuan menghasilkan nilai lebih besar dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan risiko lingkungan yang lebih rendah. Investasi dalam efisiensi air, energi bersih, diversifikasi, agroforestri, pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, dan adaptasi iklim dapat diposisikan sebagai strategi ekonomi, bukan sekadar kewajiban lingkungan.

Dari sisi manajemen, keberhasilan memerlukan pembagian peran yang jelas. Pemerintah desa berfungsi sebagai pengarah, penyedia barang publik lokal, dan fasilitator; pelaku usaha menjalankan kegiatan komersial; kelompok masyarakat mengorganisasi partisipasi dan kontrol sosial; lembaga keuangan menyediakan modal; perguruan tinggi mendukung pengetahuan; sementara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat menyediakan regulasi, konektivitas, standardisasi, dan pembiayaan yang melampaui

kemampuan desa. Ketika satu aktor mengambil alih semua fungsi, sistem cenderung tidak efisien dan sulit dipertahankan.

Untuk melihat penerapannya, bayangkan sebuah desa yang memiliki satu komoditas unggulan tetapi pendapatan petani tetap rendah. Diagnosis mungkin menunjukkan bahwa masalah utama bukan kurangnya produksi, melainkan kualitas yang tidak seragam, kehilangan pascapanen, penjualan individual, dan biaya logistik. Solusi yang relevan bukan hanya subsidi input. Desa dapat mengembangkan standar panen, fasilitas pengumpulan, pencatatan mutu, pengolahan sederhana, kontrak dengan pembeli, dan pembiayaan modal kerja. Contoh ilustratif ini menunjukkan bahwa strategi pertumbuhan harus mengintervensi titik lemah yang benar-benar menentukan nilai tambah.

Setiap strategi perlu menyertakan risk register. Risiko pasar mencakup turunnya harga dan hilangnya pembeli; risiko produksi mencakup cuaca, penyakit, dan kegagalan teknologi; risiko finansial mencakup arus kas dan utang; risiko kelembagaan mencakup konflik kepentingan dan pergantian kepemimpinan; risiko sosial mencakup eksklusi kelompok lemah; risiko lingkungan mencakup degradasi sumber daya; dan risiko digital mencakup kebocoran data serta penipuan. Menyebut risiko bukan alasan untuk tidak berinovasi, tetapi cara agar inovasi dilakukan dengan disiplin.

16. Ekonomi Hijau dan Green Jobs di Perdesaan

Transisi hijau membuka pekerjaan baru di energi terbarukan, pengelolaan sampah, pertanian regeneratif, restorasi ekosistem, ekowisata, biomassa, bioekonomi, dan jasa lingkungan. Desa mempunyai posisi strategis karena banyak sumber daya alam dan proyek adaptasi iklim berada di wilayah perdesaan. Secara konseptual, isu ini dapat dibaca melalui tiga lapis analisis. Pertama adalah lapis mikro, yaitu keputusan rumah tangga dan pelaku usaha tentang produksi, konsumsi, investasi, pendidikan, serta strategi menghadapi risiko. Kedua adalah lapis meso, yaitu kualitas pasar lokal, organisasi produsen, koperasi, BUM Desa, jejaring antardesa, dan hubungan dengan pembeli. Ketiga adalah lapis makro dan institusional, yaitu kebijakan fiskal, regulasi, sistem keuangan, perdagangan, konektivitas, dan kebijakan pembangunan wilayah. Ketiga lapis tersebut harus bergerak searah. Jika hanya satu lapis diperbaiki, hasilnya sering terbatas karena hambatan pada lapis lain tetap menahan produktivitas.

Green jobs tidak muncul otomatis. Mereka memerlukan standarisasi kompetensi, pembiayaan, permintaan pasar, pengadaan publik, dan kepastian kebijakan. Pelatihan instalasi panel surya, pengelolaan mikrohidro, kompos, biomassa, monitoring karbon, pembibitan, dan rehabilitasi lahan dapat menjadi bagian dari strategi pekerjaan desa. Dengan demikian agenda iklim dapat dihubungkan langsung dengan penciptaan pendapatan. Implikasi kebijakannya adalah perlunya pergeseran dari pendekatan program menuju pendekatan sistem. Program biasanya dimulai dari anggaran dan jenis kegiatan; pendekatan sistem dimulai dari masalah, tujuan ekonomi, aktor, dan mekanisme perubahan. Pertanyaan utamanya bukan 'apa yang dapat dibelanjakan tahun ini', tetapi 'hambatan apa yang menghalangi warga meningkatkan produktivitas dan pendapatan, dan kombinasi intervensi apa yang paling masuk akal untuk mengatasinya'. Orientasi seperti ini mendorong koordinasi lintas sektor serta mengurangi proyek yang berdiri sendiri tanpa hubungan dengan rantai nilai.

Dalam perspektif ekonomi inklusif, perhatian juga harus diberikan pada distribusi manfaat. Pertumbuhan lokal dapat terjadi tetapi tetap eksklusif bila aset, kontrak, informasi, dan jaringan hanya dikuasai kelompok kecil. Karena itu desain kebijakan perlu memeriksa siapa yang memperoleh pekerjaan, siapa yang memiliki

aset, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang memiliki suara dalam keputusan. Kelompok miskin, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, masyarakat adat, pekerja informal, serta rumah tangga di lokasi terpencil harus masuk dalam desain sejak awal. Inklusi bukan tambahan setelah pertumbuhan terjadi, melainkan bagian dari arsitektur pertumbuhan itu sendiri.

Dimensi lain adalah keberlanjutan. Peningkatan produksi yang menguras tanah, air, hutan, atau pesisir dapat menciptakan pendapatan sesaat tetapi memperbesar kerentanan di masa depan. Karena itu produktivitas perlu dipahami sebagai kemampuan menghasilkan nilai lebih besar dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan risiko lingkungan yang lebih rendah. Investasi dalam efisiensi air, energi bersih, diversifikasi, agroforestri, pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, dan adaptasi iklim dapat diposisikan sebagai strategi ekonomi, bukan sekadar kewajiban lingkungan.

Dari sisi manajemen, keberhasilan memerlukan pembagian peran yang jelas. Pemerintah desa berfungsi sebagai pengarah, penyedia barang publik lokal, dan fasilitator; pelaku usaha menjalankan kegiatan komersial; kelompok masyarakat mengorganisasi partisipasi dan kontrol sosial; lembaga keuangan menyediakan modal; perguruan tinggi mendukung pengetahuan; sementara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat menyediakan regulasi, konektivitas, standardisasi, dan pembiayaan yang melampaui kemampuan desa. Ketika satu aktor mengambil alih semua fungsi, sistem cenderung tidak efisien dan sulit dipertahankan.

Untuk melihat penerapannya, bayangkan sebuah desa yang memiliki satu komoditas unggulan tetapi pendapatan petani tetap rendah. Diagnosis mungkin menunjukkan bahwa masalah utama bukan kurangnya produksi, melainkan kualitas yang tidak seragam, kehilangan pascapanen, penjualan individual, dan biaya logistik. Solusi yang relevan bukan hanya subsidi input. Desa dapat mengembangkan standar panen, fasilitas pengumpulan, pencatatan mutu, pengolahan sederhana, kontrak dengan pembeli, dan pembiayaan modal kerja. Contoh ilustratif ini menunjukkan bahwa strategi pertumbuhan harus mengintervensi titik lemah yang benar-benar menentukan nilai tambah.

Mekanisme transmisi menuju kesejahteraan dapat dijelaskan sebagai rantai: investasi publik dan kelembagaan menurunkan biaya transaksi; penurunan biaya meningkatkan kelayakan usaha; usaha yang lebih layak mendorong investasi swasta dan adopsi teknologi; produktivitas yang meningkat memperbesar surplus; surplus memungkinkan upah, keuntungan, dan penerimaan lokal meningkat; peningkatan pendapatan memperkuat konsumsi, tabungan, pendidikan, kesehatan, dan aset rumah tangga. Rantai ini tidak otomatis. Bila pasar tenaga kerja lemah atau kekuatan tawar timpang, produktivitas dapat meningkat tanpa peningkatan pendapatan yang proporsional. Karena itu kualitas institusi pasar dan perlindungan sosial tetap penting.

17. Ketahanan Pangan sebagai Mesin Pertumbuhan

Ketahanan pangan sering diperlakukan hanya sebagai isu ketersediaan komoditas, padahal ia juga merupakan isu pendapatan, logistik, diversifikasi, gizi, dan ketahanan rantai pasok. Desa dapat memainkan peran ganda sebagai produsen pangan sekaligus pusat inovasi sistem pangan lokal. Secara konseptual, isu ini dapat dibaca melalui tiga lapis analisis. Pertama adalah lapis mikro, yaitu keputusan rumah tangga dan pelaku usaha tentang produksi, konsumsi, investasi, pendidikan, serta strategi menghadapi risiko. Kedua adalah lapis meso, yaitu kualitas pasar lokal, organisasi produsen, koperasi, BUM Desa, jejaring antardesa, dan hubungan dengan pembeli. Ketiga adalah lapis makro dan institusional, yaitu kebijakan fiskal, regulasi,

sistem keuangan, perdagangan, konektivitas, dan kebijakan pembangunan wilayah. Ketiga lapis tersebut harus bergerak searah. Jika hanya satu lapis diperbaiki, hasilnya sering terbatas karena hambatan pada lapis lain tetap menahan produktivitas.

Diversifikasi komoditas, pangan lokal, pengolahan, cold chain, pasar petani, kontrak dengan sekolah atau rumah sakit, dan pengadaan pemerintah dapat menciptakan permintaan yang lebih stabil. Ketika kebijakan pangan dihubungkan dengan pengembangan usaha, manfaatnya tidak berhenti pada produksi tetapi meluas ke pengemasan, transportasi, kuliner, jasa mesin, hingga perdagangan. Implikasi kebijakannya adalah perlunya pergeseran dari pendekatan program menuju pendekatan sistem. Program biasanya dimulai dari anggaran dan jenis kegiatan; pendekatan sistem dimulai dari masalah, tujuan ekonomi, aktor, dan mekanisme perubahan. Pertanyaan utamanya bukan 'apa yang dapat dibelanjakan tahun ini', tetapi 'hambatan apa yang menghalangi warga meningkatkan produktivitas dan pendapatan, dan kombinasi intervensi apa yang paling masuk akal untuk mengatasinya'. Orientasi seperti ini mendorong koordinasi lintas sektor serta mengurangi proyek yang berdiri sendiri tanpa hubungan dengan rantai nilai.

Dalam perspektif ekonomi inklusif, perhatian juga harus diberikan pada distribusi manfaat. Pertumbuhan lokal dapat terjadi tetapi tetap eksklusif bila aset, kontrak, informasi, dan jaringan hanya dikuasai kelompok kecil. Karena itu desain kebijakan perlu memeriksa siapa yang memperoleh pekerjaan, siapa yang memiliki aset, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang memiliki suara dalam keputusan. Kelompok miskin, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, masyarakat adat, pekerja informal, serta rumah tangga di lokasi terpencil harus masuk dalam desain sejak awal. Inklusi bukan tambahan setelah pertumbuhan terjadi, melainkan bagian dari arsitektur pertumbuhan itu sendiri.

Dimensi lain adalah keberlanjutan. Peningkatan produksi yang menguras tanah, air, hutan, atau pesisir dapat menciptakan pendapatan sesaat tetapi memperbesar kerentanan di masa depan. Karena itu produktivitas perlu dipahami sebagai kemampuan menghasilkan nilai lebih besar dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan risiko lingkungan yang lebih rendah. Investasi dalam efisiensi air, energi bersih, diversifikasi, agroforestri, pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, dan adaptasi iklim dapat diposisikan sebagai strategi ekonomi, bukan sekadar kewajiban lingkungan.

Dari sisi manajemen, keberhasilan memerlukan pembagian peran yang jelas. Pemerintah desa berfungsi sebagai pengarah, penyedia barang publik lokal, dan fasilitator; pelaku usaha menjalankan kegiatan komersial; kelompok masyarakat mengorganisasi partisipasi dan kontrol sosial; lembaga keuangan menyediakan modal; perguruan tinggi mendukung pengetahuan; sementara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat menyediakan regulasi, konektivitas, standardisasi, dan pembiayaan yang melampaui kemampuan desa. Ketika satu aktor mengambil alih semua fungsi, sistem cenderung tidak efisien dan sulit dipertahankan.

Untuk melihat penerapannya, bayangkan sebuah desa yang memiliki satu komoditas unggulan tetapi pendapatan petani tetap rendah. Diagnosis mungkin menunjukkan bahwa masalah utama bukan kurangnya produksi, melainkan kualitas yang tidak seragam, kehilangan pascapanen, penjualan individual, dan biaya logistik. Solusi yang relevan bukan hanya subsidi input. Desa dapat mengembangkan standar panen, fasilitas pengumpulan, pencatatan mutu, pengolahan sederhana, kontrak dengan pembeli, dan pembiayaan modal kerja. Contoh ilustratif ini menunjukkan bahwa strategi pertumbuhan harus mengintervensi titik lemah yang benar-benar menentukan nilai tambah.

Indikator operasional perlu disusun dalam dashboard sederhana. Pada sisi ekonomi dapat digunakan produktivitas per pekerja, omzet usaha, nilai tambah per kilogram produk, jumlah pelanggan di luar desa,

proporsi produk yang diolah lokal, dan biaya logistik. Pada sisi sosial dapat digunakan pendapatan rumah tangga, kemiskinan, partisipasi perempuan dan pemuda, akses pelatihan, serta kualitas pekerjaan. Pada sisi lingkungan dapat digunakan tutupan vegetasi, kualitas air, efisiensi energi, pengelolaan sampah, dan risiko bencana. Pada sisi kelembagaan dapat digunakan transparansi anggaran, kualitas laporan usaha, tingkat partisipasi, dan penyelesaian pengaduan.

18. Pariwisata Desa dan Experience Economy

Pariwisata desa dapat menjadi sumber diversifikasi pendapatan jika dikembangkan berdasarkan daya dukung lingkungan, keaslian budaya, dan partisipasi masyarakat. Kesalahan umum adalah berfokus pada pembangunan objek fisik tanpa membangun pengalaman, kualitas layanan, pemasaran, dan tata kelola destinasi. Secara konseptual, isu ini dapat dibaca melalui tiga lapis analisis. Pertama adalah lapis mikro, yaitu keputusan rumah tangga dan pelaku usaha tentang produksi, konsumsi, investasi, pendidikan, serta strategi menghadapi risiko. Kedua adalah lapis meso, yaitu kualitas pasar lokal, organisasi produsen, koperasi, BUM Desa, jejaring antardesa, dan hubungan dengan pembeli. Ketiga adalah lapis makro dan institusional, yaitu kebijakan fiskal, regulasi, sistem keuangan, perdagangan, konektivitas, dan kebijakan pembangunan wilayah. Ketiga lapis tersebut harus bergerak searah. Jika hanya satu lapis diperbaiki, hasilnya sering terbatas karena hambatan pada lapis lain tetap menahan produktivitas.

Dalam experience economy, nilai berasal dari kombinasi lanskap, cerita, kuliner, budaya, aktivitas, keramahan, dan kualitas interaksi. Homestay, pemandu, transportasi lokal, kerajinan, pertunjukan budaya, dan produk pangan dapat membentuk ekosistem. Pendapatan wisata perlu menyebar ke banyak rumah tangga agar dukungan masyarakat tetap kuat dan risiko overtourism dapat dikendalikan. Implikasi kebijakannya adalah perlunya pergeseran dari pendekatan program menuju pendekatan sistem. Program biasanya dimulai dari anggaran dan jenis kegiatan; pendekatan sistem dimulai dari masalah, tujuan ekonomi, aktor, dan mekanisme perubahan. Pertanyaan utamanya bukan 'apa yang dapat dibelanjakan tahun ini', tetapi 'hambatan apa yang menghalangi warga meningkatkan produktivitas dan pendapatan, dan kombinasi intervensi apa yang paling masuk akal untuk mengatasinya'. Orientasi seperti ini mendorong koordinasi lintas sektor serta mengurangi proyek yang berdiri sendiri tanpa hubungan dengan rantai nilai.

Dalam perspektif ekonomi inklusif, perhatian juga harus diberikan pada distribusi manfaat. Pertumbuhan lokal dapat terjadi tetapi tetap eksklusif bila aset, kontrak, informasi, dan jaringan hanya dikuasai kelompok kecil. Karena itu desain kebijakan perlu memeriksa siapa yang memperoleh pekerjaan, siapa yang memiliki aset, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang memiliki suara dalam keputusan. Kelompok miskin, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, masyarakat adat, pekerja informal, serta rumah tangga di lokasi terpencil harus masuk dalam desain sejak awal. Inklusi bukan tambahan setelah pertumbuhan terjadi, melainkan bagian dari arsitektur pertumbuhan itu sendiri.

Dimensi lain adalah keberlanjutan. Peningkatan produksi yang menguras tanah, air, hutan, atau pesisir dapat menciptakan pendapatan sesaat tetapi memperbesar kerentanan di masa depan. Karena itu produktivitas perlu dipahami sebagai kemampuan menghasilkan nilai lebih besar dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan risiko lingkungan yang lebih rendah. Investasi dalam efisiensi air, energi bersih, diversifikasi, agroforestri, pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, dan adaptasi iklim dapat diposisikan sebagai strategi ekonomi, bukan sekadar kewajiban lingkungan.

Dari sisi manajemen, keberhasilan memerlukan pembagian peran yang jelas. Pemerintah desa berfungsi sebagai pengarah, penyedia barang publik lokal, dan fasilitator; pelaku usaha menjalankan kegiatan komersial; kelompok masyarakat mengorganisasi partisipasi dan kontrol sosial; lembaga keuangan menyediakan modal; perguruan tinggi mendukung pengetahuan; sementara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat menyediakan regulasi, konektivitas, standardisasi, dan pembiayaan yang melampaui kemampuan desa. Ketika satu aktor mengambil alih semua fungsi, sistem cenderung tidak efisien dan sulit dipertahankan.

Untuk melihat penerapannya, bayangkan sebuah desa yang memiliki satu komoditas unggulan tetapi pendapatan petani tetap rendah. Diagnosis mungkin menunjukkan bahwa masalah utama bukan kurangnya produksi, melainkan kualitas yang tidak seragam, kehilangan pascapanen, penjualan individual, dan biaya logistik. Solusi yang relevan bukan hanya subsidi input. Desa dapat mengembangkan standar panen, fasilitas pengumpulan, pencatatan mutu, pengolahan sederhana, kontrak dengan pembeli, dan pembiayaan modal kerja. Contoh ilustratif ini menunjukkan bahwa strategi pertumbuhan harus mengintervensi titik lemah yang benar-benar menentukan nilai tambah.

Setiap strategi perlu menyertakan risk register. Risiko pasar mencakup turunnya harga dan hilangnya pembeli; risiko produksi mencakup cuaca, penyakit, dan kegagalan teknologi; risiko finansial mencakup arus kas dan utang; risiko kelembagaan mencakup konflik kepentingan dan pergantian kepemimpinan; risiko sosial mencakup eksklusi kelompok lemah; risiko lingkungan mencakup degradasi sumber daya; dan risiko digital mencakup kebocoran data serta penipuan. Menyebut risiko bukan alasan untuk tidak berinovasi, tetapi cara agar inovasi dilakukan dengan disiplin.

19. Ekonomi Kreatif, Budaya, dan Identitas Lokal

Kebudayaan dapat menjadi sumber nilai ekonomi tanpa harus direduksi menjadi komoditas. Kerajinan, musik, kuliner, desain, cerita lokal, produk tekstil, seni pertunjukan, dan pengetahuan tradisional dapat dikembangkan dengan prinsip perlindungan hak, otentisitas, dan pembagian manfaat yang adil. Secara konseptual, isu ini dapat dibaca melalui tiga lapis analisis. Pertama adalah lapis mikro, yaitu keputusan rumah tangga dan pelaku usaha tentang produksi, konsumsi, investasi, pendidikan, serta strategi menghadapi risiko. Kedua adalah lapis meso, yaitu kualitas pasar lokal, organisasi produsen, koperasi, BUM Desa, jejaring antardesa, dan hubungan dengan pembeli. Ketiga adalah lapis makro dan institusional, yaitu kebijakan fiskal, regulasi, sistem keuangan, perdagangan, konektivitas, dan kebijakan pembangunan wilayah. Ketiga lapis tersebut harus bergerak searah. Jika hanya satu lapis diperbaiki, hasilnya sering terbatas karena hambatan pada lapis lain tetap menahan produktivitas.

Teknologi digital memperbesar peluang desa menjangkau konsumen tanpa harus bergantung pada lokasi fisik. Namun komersialisasi budaya membutuhkan kurasi, desain produk, branding, dokumentasi, hak kekayaan intelektual, dan kemampuan bercerita. Perguruan tinggi dan komunitas kreatif dapat membantu desa menerjemahkan identitas menjadi produk dan pengalaman bernilai tambah. Implikasi kebijakannya adalah perlunya pergeseran dari pendekatan program menuju pendekatan sistem. Program biasanya dimulai dari anggaran dan jenis kegiatan; pendekatan sistem dimulai dari masalah, tujuan ekonomi, aktor, dan mekanisme perubahan. Pertanyaan utamanya bukan 'apa yang dapat dibelanjakan tahun ini', tetapi 'hambatan apa yang menghalangi warga meningkatkan produktivitas dan pendapatan, dan kombinasi intervensi apa yang paling masuk akal untuk mengatasinya'. Orientasi seperti ini mendorong koordinasi lintas sektor serta mengurangi proyek yang berdiri sendiri tanpa hubungan dengan rantai nilai.

Dalam perspektif ekonomi inklusif, perhatian juga harus diberikan pada distribusi manfaat. Pertumbuhan lokal dapat terjadi tetapi tetap eksklusif bila aset, kontrak, informasi, dan jaringan hanya dikuasai kelompok kecil. Karena itu desain kebijakan perlu memeriksa siapa yang memperoleh pekerjaan, siapa yang memiliki aset, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang memiliki suara dalam keputusan. Kelompok miskin, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, masyarakat adat, pekerja informal, serta rumah tangga di lokasi terpencil harus masuk dalam desain sejak awal. Inklusi bukan tambahan setelah pertumbuhan terjadi, melainkan bagian dari arsitektur pertumbuhan itu sendiri.

Dimensi lain adalah keberlanjutan. Peningkatan produksi yang menguras tanah, air, hutan, atau pesisir dapat menciptakan pendapatan sesaat tetapi memperbesar kerentanan di masa depan. Karena itu produktivitas perlu dipahami sebagai kemampuan menghasilkan nilai lebih besar dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan risiko lingkungan yang lebih rendah. Investasi dalam efisiensi air, energi bersih, diversifikasi, agroforestri, pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, dan adaptasi iklim dapat diposisikan sebagai strategi ekonomi, bukan sekadar kewajiban lingkungan.

Dari sisi manajemen, keberhasilan memerlukan pembagian peran yang jelas. Pemerintah desa berfungsi sebagai pengarah, penyedia barang publik lokal, dan fasilitator; pelaku usaha menjalankan kegiatan komersial; kelompok masyarakat mengorganisasi partisipasi dan kontrol sosial; lembaga keuangan menyediakan modal; perguruan tinggi mendukung pengetahuan; sementara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat menyediakan regulasi, konektivitas, standardisasi, dan pembiayaan yang melampaui kemampuan desa. Ketika satu aktor mengambil alih semua fungsi, sistem cenderung tidak efisien dan sulit dipertahankan.

Untuk melihat penerapannya, bayangkan sebuah desa yang memiliki satu komoditas unggulan tetapi pendapatan petani tetap rendah. Diagnosis mungkin menunjukkan bahwa masalah utama bukan kurangnya produksi, melainkan kualitas yang tidak seragam, kehilangan pascapanen, penjualan individual, dan biaya logistik. Solusi yang relevan bukan hanya subsidi input. Desa dapat mengembangkan standar panen, fasilitas pengumpulan, pencatatan mutu, pengolahan sederhana, kontrak dengan pembeli, dan pembiayaan modal kerja. Contoh ilustratif ini menunjukkan bahwa strategi pertumbuhan harus mengintervensi titik lemah yang benar-benar menentukan nilai tambah.

Mekanisme transmisi menuju kesejahteraan dapat dijelaskan sebagai rantai: investasi publik dan kelembagaan menurunkan biaya transaksi; penurunan biaya meningkatkan kelayakan usaha; usaha yang lebih layak mendorong investasi swasta dan adopsi teknologi; produktivitas yang meningkat memperbesar surplus; surplus memungkinkan upah, keuntungan, dan penerimaan lokal meningkat; peningkatan pendapatan memperkuat konsumsi, tabungan, pendidikan, kesehatan, dan aset rumah tangga. Rantai ini tidak otomatis. Bila pasar tenaga kerja lemah atau kekuatan tawar timpang, produktivitas dapat meningkat tanpa peningkatan pendapatan yang proporsional. Karena itu kualitas institusi pasar dan perlindungan sosial tetap penting.

20. Pembiayaan Ekonomi Desa

Banyak usaha desa menghadapi missing middle: terlalu besar untuk pembiayaan mikro tradisional, tetapi terlalu kecil atau tidak cukup formal untuk kredit komersial. Pembiayaan perlu disesuaikan dengan siklus usaha, musim panen, arus kas, dan jenis aset yang dimiliki. Kredit yang tidak sesuai dengan pola pendapatan dapat meningkatkan risiko gagal bayar meskipun usahanya layak. Secara konseptual, isu ini dapat dibaca

melalui tiga lapis analisis. Pertama adalah lapis mikro, yaitu keputusan rumah tangga dan pelaku usaha tentang produksi, konsumsi, investasi, pendidikan, serta strategi menghadapi risiko. Kedua adalah lapis meso, yaitu kualitas pasar lokal, organisasi produsen, koperasi, BUM Desa, jejaring antardesa, dan hubungan dengan pembeli. Ketiga adalah lapis makro dan institusional, yaitu kebijakan fiskal, regulasi, sistem keuangan, perdagangan, konektivitas, dan kebijakan pembangunan wilayah. Ketiga lapis tersebut harus bergerak searah. Jika hanya satu lapis diperbaiki, hasilnya sering terbatas karena hambatan pada lapis lain tetap menahan produktivitas.

Ekosistem pembiayaan dapat mencakup KUR, koperasi, bank daerah, BPR, fintech yang bertanggung jawab, pembiayaan rantai pasok, invoice financing, dana bergulir, dan investasi berdampak. Di sisi lain, kesiapan usaha harus ditingkatkan melalui pencatatan, tata kelola, legalitas, dan manajemen risiko. Akses modal dan kesiapan usaha harus bergerak bersama. Implikasi kebijakannya adalah perlunya pergeseran dari pendekatan program menuju pendekatan sistem. Program biasanya dimulai dari anggaran dan jenis kegiatan; pendekatan sistem dimulai dari masalah, tujuan ekonomi, aktor, dan mekanisme perubahan. Pertanyaan utamanya bukan 'apa yang dapat dibelanjakan tahun ini', tetapi 'hambatan apa yang menghalangi warga meningkatkan produktivitas dan pendapatan, dan kombinasi intervensi apa yang paling masuk akal untuk mengatasinya'. Orientasi seperti ini mendorong koordinasi lintas sektor serta mengurangi proyek yang berdiri sendiri tanpa hubungan dengan rantai nilai.

Dalam perspektif ekonomi inklusif, perhatian juga harus diberikan pada distribusi manfaat. Pertumbuhan lokal dapat terjadi tetapi tetap eksklusif bila aset, kontrak, informasi, dan jaringan hanya dikuasai kelompok kecil. Karena itu desain kebijakan perlu memeriksa siapa yang memperoleh pekerjaan, siapa yang memiliki aset, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang memiliki suara dalam keputusan. Kelompok miskin, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, masyarakat adat, pekerja informal, serta rumah tangga di lokasi terpencil harus masuk dalam desain sejak awal. Inklusi bukan tambahan setelah pertumbuhan terjadi, melainkan bagian dari arsitektur pertumbuhan itu sendiri.

Dimensi lain adalah keberlanjutan. Peningkatan produksi yang menguras tanah, air, hutan, atau pesisir dapat menciptakan pendapatan sesaat tetapi memperbesar kerentanan di masa depan. Karena itu produktivitas perlu dipahami sebagai kemampuan menghasilkan nilai lebih besar dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan risiko lingkungan yang lebih rendah. Investasi dalam efisiensi air, energi bersih, diversifikasi, agroforestri, pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, dan adaptasi iklim dapat diposisikan sebagai strategi ekonomi, bukan sekadar kewajiban lingkungan.

Dari sisi manajemen, keberhasilan memerlukan pembagian peran yang jelas. Pemerintah desa berfungsi sebagai pengarah, penyedia barang publik lokal, dan fasilitator; pelaku usaha menjalankan kegiatan komersial; kelompok masyarakat mengorganisasi partisipasi dan kontrol sosial; lembaga keuangan menyediakan modal; perguruan tinggi mendukung pengetahuan; sementara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat menyediakan regulasi, konektivitas, standardisasi, dan pembiayaan yang melampaui kemampuan desa. Ketika satu aktor mengambil alih semua fungsi, sistem cenderung tidak efisien dan sulit dipertahankan.

Untuk melihat penerapannya, bayangkan sebuah desa yang memiliki satu komoditas unggulan tetapi pendapatan petani tetap rendah. Diagnosis mungkin menunjukkan bahwa masalah utama bukan kurangnya produksi, melainkan kualitas yang tidak seragam, kehilangan pascapanen, penjualan individual, dan biaya logistik. Solusi yang relevan bukan hanya subsidi input. Desa dapat mengembangkan standar panen, fasilitas pengumpulan, pencatatan mutu, pengolahan sederhana, kontrak dengan pembeli, dan

pembiayaan modal kerja. Contoh ilustratif ini menunjukkan bahwa strategi pertumbuhan harus mengintervensi titik lemah yang benar-benar menentukan nilai tambah.

Indikator operasional perlu disusun dalam dashboard sederhana. Pada sisi ekonomi dapat digunakan produktivitas per pekerja, omzet usaha, nilai tambah per kilogram produk, jumlah pelanggan di luar desa, proporsi produk yang diolah lokal, dan biaya logistik. Pada sisi sosial dapat digunakan pendapatan rumah tangga, kemiskinan, partisipasi perempuan dan pemuda, akses pelatihan, serta kualitas pekerjaan. Pada sisi lingkungan dapat digunakan tutupan vegetasi, kualitas air, efisiensi energi, pengelolaan sampah, dan risiko bencana. Pada sisi kelembagaan dapat digunakan transparansi anggaran, kualitas laporan usaha, tingkat partisipasi, dan penyelesaian pengaduan.

21. Inklusi Keuangan dan Digital Payment

Pembayaran digital dapat menurunkan biaya transaksi, memperbaiki pencatatan, dan membuka jejak data bagi usaha kecil. Namun digital finance juga membawa risiko penipuan, kredit berbiaya tinggi, kebocoran data, dan ketergantungan pada platform. Literasi keuangan harus diperluas menjadi literasi risiko digital. Secara konseptual, isu ini dapat dibaca melalui tiga lapis analisis. Pertama adalah lapis mikro, yaitu keputusan rumah tangga dan pelaku usaha tentang produksi, konsumsi, investasi, pendidikan, serta strategi menghadapi risiko. Kedua adalah lapis meso, yaitu kualitas pasar lokal, organisasi produsen, koperasi, BUM Desa, jejaring antardesa, dan hubungan dengan pembeli. Ketiga adalah lapis makro dan institusional, yaitu kebijakan fiskal, regulasi, sistem keuangan, perdagangan, konektivitas, dan kebijakan pembangunan wilayah. Ketiga lapis tersebut harus bergerak searah. Jika hanya satu lapis diperbaiki, hasilnya sering terbatas karena hambatan pada lapis lain tetap menahan produktivitas.

Pemerintah desa dapat mendukung ekosistem pembayaran melalui penerimaan non-tunai, pasar desa digital, pelatihan pedagang, dan integrasi dengan pembukuan. Tujuannya bukan menghilangkan uang tunai secara paksa, tetapi memperluas pilihan serta meningkatkan efisiensi dan transparansi. Implikasi kebijakannya adalah perlunya pergeseran dari pendekatan program menuju pendekatan sistem. Program biasanya dimulai dari anggaran dan jenis kegiatan; pendekatan sistem dimulai dari masalah, tujuan ekonomi, aktor, dan mekanisme perubahan. Pertanyaan utamanya bukan 'apa yang dapat dibelanjakan tahun ini', tetapi 'hambatan apa yang menghalangi warga meningkatkan produktivitas dan pendapatan, dan kombinasi intervensi apa yang paling masuk akal untuk mengatasinya'. Orientasi seperti ini mendorong koordinasi lintas sektor serta mengurangi proyek yang berdiri sendiri tanpa hubungan dengan rantai nilai.

Dalam perspektif ekonomi inklusif, perhatian juga harus diberikan pada distribusi manfaat. Pertumbuhan lokal dapat terjadi tetapi tetap eksklusif bila aset, kontrak, informasi, dan jaringan hanya dikuasai kelompok kecil. Karena itu desain kebijakan perlu memeriksa siapa yang memperoleh pekerjaan, siapa yang memiliki aset, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang memiliki suara dalam keputusan. Kelompok miskin, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, masyarakat adat, pekerja informal, serta rumah tangga di lokasi terpencil harus masuk dalam desain sejak awal. Inklusi bukan tambahan setelah pertumbuhan terjadi, melainkan bagian dari arsitektur pertumbuhan itu sendiri.

Dimensi lain adalah keberlanjutan. Peningkatan produksi yang menguras tanah, air, hutan, atau pesisir dapat menciptakan pendapatan sesaat tetapi memperbesar kerentanan di masa depan. Karena itu produktivitas perlu dipahami sebagai kemampuan menghasilkan nilai lebih besar dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan risiko lingkungan yang lebih rendah. Investasi dalam efisiensi air, energi

bersih, diversifikasi, agroforestri, pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, dan adaptasi iklim dapat diposisikan sebagai strategi ekonomi, bukan sekadar kewajiban lingkungan.

Dari sisi manajemen, keberhasilan memerlukan pembagian peran yang jelas. Pemerintah desa berfungsi sebagai pengarah, penyedia barang publik lokal, dan fasilitator; pelaku usaha menjalankan kegiatan komersial; kelompok masyarakat mengorganisasi partisipasi dan kontrol sosial; lembaga keuangan menyediakan modal; perguruan tinggi mendukung pengetahuan; sementara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat menyediakan regulasi, konektivitas, standardisasi, dan pembiayaan yang melampaui kemampuan desa. Ketika satu aktor mengambil alih semua fungsi, sistem cenderung tidak efisien dan sulit dipertahankan.

Untuk melihat penerapannya, bayangkan sebuah desa yang memiliki satu komoditas unggulan tetapi pendapatan petani tetap rendah. Diagnosis mungkin menunjukkan bahwa masalah utama bukan kurangnya produksi, melainkan kualitas yang tidak seragam, kehilangan pascapanen, penjualan individual, dan biaya logistik. Solusi yang relevan bukan hanya subsidi input. Desa dapat mengembangkan standar panen, fasilitas pengumpulan, pencatatan mutu, pengolahan sederhana, kontrak dengan pembeli, dan pembiayaan modal kerja. Contoh ilustratif ini menunjukkan bahwa strategi pertumbuhan harus mengintervensi titik lemah yang benar-benar menentukan nilai tambah.

Setiap strategi perlu menyertakan risk register. Risiko pasar mencakup turunnya harga dan hilangnya pembeli; risiko produksi mencakup cuaca, penyakit, dan kegagalan teknologi; risiko finansial mencakup arus kas dan utang; risiko kelembagaan mencakup konflik kepentingan dan pergantian kepemimpinan; risiko sosial mencakup eksklusi kelompok lemah; risiko lingkungan mencakup degradasi sumber daya; dan risiko digital mencakup kebocoran data serta penipuan. Menyebut risiko bukan alasan untuk tidak berinovasi, tetapi cara agar inovasi dilakukan dengan disiplin.

22. Tata Kelola Desa dan Kualitas Institusi

Pertumbuhan lokal memerlukan institusi yang dapat dipercaya. Kepastian aturan, transparansi anggaran, akuntabilitas BUM Desa, partisipasi warga, pengadaan yang kompetitif, serta mekanisme pengaduan mempengaruhi apakah investasi publik menghasilkan manfaat atau rente. Modal sosial yang kuat dapat menjadi keunggulan, tetapi juga perlu diimbangi aturan formal agar proses tidak dikuasai kelompok tertentu. Secara konseptual, isu ini dapat dibaca melalui tiga lapis analisis. Pertama adalah lapis mikro, yaitu keputusan rumah tangga dan pelaku usaha tentang produksi, konsumsi, investasi, pendidikan, serta strategi menghadapi risiko. Kedua adalah lapis meso, yaitu kualitas pasar lokal, organisasi produsen, koperasi, BUM Desa, jejaring antardesa, dan hubungan dengan pembeli. Ketiga adalah lapis makro dan institusional, yaitu kebijakan fiskal, regulasi, sistem keuangan, perdagangan, konektivitas, dan kebijakan pembangunan wilayah. Ketiga lapis tersebut harus bergerak searah. Jika hanya satu lapis diperbaiki, hasilnya sering terbatas karena hambatan pada lapis lain tetap menahan produktivitas.

Musyawarah desa dapat berkembang dari forum alokasi anggaran menjadi forum strategi ekonomi. Data potensi, peta rantai nilai, indikator kemiskinan, peta risiko, serta proyeksi pendapatan dapat digunakan untuk memprioritaskan intervensi. Tata kelola yang baik adalah kemampuan untuk membuat keputusan berbasis bukti, mengeksekusi, belajar dari hasil, dan memperbaiki program. Implikasi kebijakannya adalah perlunya pergeseran dari pendekatan program menuju pendekatan sistem. Program biasanya dimulai dari anggaran dan jenis kegiatan; pendekatan sistem dimulai dari masalah, tujuan ekonomi, aktor, dan

mekanisme perubahan. Pertanyaan utamanya bukan 'apa yang dapat dibelanjakan tahun ini', tetapi 'hambatan apa yang menghalangi warga meningkatkan produktivitas dan pendapatan, dan kombinasi intervensi apa yang paling masuk akal untuk mengatasinya'. Orientasi seperti ini mendorong koordinasi lintas sektor serta mengurangi proyek yang berdiri sendiri tanpa hubungan dengan rantai nilai.

Dalam perspektif ekonomi inklusif, perhatian juga harus diberikan pada distribusi manfaat. Pertumbuhan lokal dapat terjadi tetapi tetap eksklusif bila aset, kontrak, informasi, dan jaringan hanya dikuasai kelompok kecil. Karena itu desain kebijakan perlu memeriksa siapa yang memperoleh pekerjaan, siapa yang memiliki aset, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang memiliki suara dalam keputusan. Kelompok miskin, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, masyarakat adat, pekerja informal, serta rumah tangga di lokasi terpencil harus masuk dalam desain sejak awal. Inklusi bukan tambahan setelah pertumbuhan terjadi, melainkan bagian dari arsitektur pertumbuhan itu sendiri.

Dimensi lain adalah keberlanjutan. Peningkatan produksi yang menguras tanah, air, hutan, atau pesisir dapat menciptakan pendapatan sesaat tetapi memperbesar kerentanan di masa depan. Karena itu produktivitas perlu dipahami sebagai kemampuan menghasilkan nilai lebih besar dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan risiko lingkungan yang lebih rendah. Investasi dalam efisiensi air, energi bersih, diversifikasi, agroforestri, pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, dan adaptasi iklim dapat diposisikan sebagai strategi ekonomi, bukan sekadar kewajiban lingkungan.

Dari sisi manajemen, keberhasilan memerlukan pembagian peran yang jelas. Pemerintah desa berfungsi sebagai pengarah, penyedia barang publik lokal, dan fasilitator; pelaku usaha menjalankan kegiatan komersial; kelompok masyarakat mengorganisasi partisipasi dan kontrol sosial; lembaga keuangan menyediakan modal; perguruan tinggi mendukung pengetahuan; sementara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat menyediakan regulasi, konektivitas, standardisasi, dan pembiayaan yang melampaui kemampuan desa. Ketika satu aktor mengambil alih semua fungsi, sistem cenderung tidak efisien dan sulit dipertahankan.

Untuk melihat penerapannya, bayangkan sebuah desa yang memiliki satu komoditas unggulan tetapi pendapatan petani tetap rendah. Diagnosis mungkin menunjukkan bahwa masalah utama bukan kurangnya produksi, melainkan kualitas yang tidak seragam, kehilangan pascapanen, penjualan individual, dan biaya logistik. Solusi yang relevan bukan hanya subsidi input. Desa dapat mengembangkan standar panen, fasilitas pengumpulan, pencatatan mutu, pengolahan sederhana, kontrak dengan pembeli, dan pembiayaan modal kerja. Contoh ilustratif ini menunjukkan bahwa strategi pertumbuhan harus mengintervensi titik lemah yang benar-benar menentukan nilai tambah.

Mekanisme transmisi menuju kesejahteraan dapat dijelaskan sebagai rantai: investasi publik dan kelembagaan menurunkan biaya transaksi; penurunan biaya meningkatkan kelayakan usaha; usaha yang lebih layak mendorong investasi swasta dan adopsi teknologi; produktivitas yang meningkat memperbesar surplus; surplus memungkinkan upah, keuntungan, dan penerimaan lokal meningkat; peningkatan pendapatan memperkuat konsumsi, tabungan, pendidikan, kesehatan, dan aset rumah tangga. Rantai ini tidak otomatis. Bila pasar tenaga kerja lemah atau kekuatan tawar timpang, produktivitas dapat meningkat tanpa peningkatan pendapatan yang proporsional. Karena itu kualitas institusi pasar dan perlindungan sosial tetap penting.

23. Place-Based Development dan Diferensiasi Strategi

Pendekatan place-based menolak asumsi bahwa satu kebijakan cocok untuk semua wilayah. Setiap tempat memiliki kombinasi aset, institusi, jaringan, demografi, dan aksesibilitas yang berbeda. Kebijakan nasional tetap penting untuk standar, pembiayaan, dan redistribusi, tetapi desain program lokal perlu fleksibel. Secara konseptual, isu ini dapat dibaca melalui tiga lapis analisis. Pertama adalah lapis mikro, yaitu keputusan rumah tangga dan pelaku usaha tentang produksi, konsumsi, investasi, pendidikan, serta strategi menghadapi risiko. Kedua adalah lapis meso, yaitu kualitas pasar lokal, organisasi produsen, koperasi, BUM Desa, jejaring antardesa, dan hubungan dengan pembeli. Ketiga adalah lapis makro dan institusional, yaitu kebijakan fiskal, regulasi, sistem keuangan, perdagangan, konektivitas, dan kebijakan pembangunan wilayah. Ketiga lapis tersebut harus bergerak searah. Jika hanya satu lapis diperbaiki, hasilnya sering terbatas karena hambatan pada lapis lain tetap menahan produktivitas.

Desa dekat kota mungkin mengembangkan logistik, hortikultura segar, jasa, dan komuter. Desa terpencil dapat memerlukan pusat layanan, energi terdesentralisasi, internet satelit, dan produk bernilai tinggi yang tidak sensitif terhadap biaya angkut. Desa pesisir dapat mengembangkan perikanan, cold chain, wisata, dan restorasi mangrove. Diferensiasi inilah yang membuat kebijakan lebih efisien. Implikasi kebijakannya adalah perlunya pergeseran dari pendekatan program menuju pendekatan sistem. Program biasanya dimulai dari anggaran dan jenis kegiatan; pendekatan sistem dimulai dari masalah, tujuan ekonomi, aktor, dan mekanisme perubahan. Pertanyaan utamanya bukan 'apa yang dapat dibelanjakan tahun ini', tetapi 'hambatan apa yang menghalangi warga meningkatkan produktivitas dan pendapatan, dan kombinasi intervensi apa yang paling masuk akal untuk mengatasinya'. Orientasi seperti ini mendorong koordinasi lintas sektor serta mengurangi proyek yang berdiri sendiri tanpa hubungan dengan rantai nilai.

Dalam perspektif ekonomi inklusif, perhatian juga harus diberikan pada distribusi manfaat. Pertumbuhan lokal dapat terjadi tetapi tetap eksklusif bila aset, kontrak, informasi, dan jaringan hanya dikuasai kelompok kecil. Karena itu desain kebijakan perlu memeriksa siapa yang memperoleh pekerjaan, siapa yang memiliki aset, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang memiliki suara dalam keputusan. Kelompok miskin, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, masyarakat adat, pekerja informal, serta rumah tangga di lokasi terpencil harus masuk dalam desain sejak awal. Inklusi bukan tambahan setelah pertumbuhan terjadi, melainkan bagian dari arsitektur pertumbuhan itu sendiri.

Dimensi lain adalah keberlanjutan. Peningkatan produksi yang menguras tanah, air, hutan, atau pesisir dapat menciptakan pendapatan sesaat tetapi memperbesar kerentanan di masa depan. Karena itu produktivitas perlu dipahami sebagai kemampuan menghasilkan nilai lebih besar dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan risiko lingkungan yang lebih rendah. Investasi dalam efisiensi air, energi bersih, diversifikasi, agroforestri, pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, dan adaptasi iklim dapat diposisikan sebagai strategi ekonomi, bukan sekadar kewajiban lingkungan.

Dari sisi manajemen, keberhasilan memerlukan pembagian peran yang jelas. Pemerintah desa berfungsi sebagai pengarah, penyedia barang publik lokal, dan fasilitator; pelaku usaha menjalankan kegiatan komersial; kelompok masyarakat mengorganisasi partisipasi dan kontrol sosial; lembaga keuangan menyediakan modal; perguruan tinggi mendukung pengetahuan; sementara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat menyediakan regulasi, konektivitas, standardisasi, dan pembiayaan yang melampaui kemampuan desa. Ketika satu aktor mengambil alih semua fungsi, sistem cenderung tidak efisien dan sulit dipertahankan.

Untuk melihat penerapannya, bayangkan sebuah desa yang memiliki satu komoditas unggulan tetapi pendapatan petani tetap rendah. Diagnosis mungkin menunjukkan bahwa masalah utama bukan kurangnya produksi, melainkan kualitas yang tidak seragam, kehilangan pascapanen, penjualan individual, dan biaya logistik. Solusi yang relevan bukan hanya subsidi input. Desa dapat mengembangkan standar panen, fasilitas pengumpulan, pencatatan mutu, pengolahan sederhana, kontrak dengan pembeli, dan pembiayaan modal kerja. Contoh ilustratif ini menunjukkan bahwa strategi pertumbuhan harus mengintervensi titik lemah yang benar-benar menentukan nilai tambah.

Indikator operasional perlu disusun dalam dashboard sederhana. Pada sisi ekonomi dapat digunakan produktivitas per pekerja, omzet usaha, nilai tambah per kilogram produk, jumlah pelanggan di luar desa, proporsi produk yang diolah lokal, dan biaya logistik. Pada sisi sosial dapat digunakan pendapatan rumah tangga, kemiskinan, partisipasi perempuan dan pemuda, akses pelatihan, serta kualitas pekerjaan. Pada sisi lingkungan dapat digunakan tutupan vegetasi, kualitas air, efisiensi energi, pengelolaan sampah, dan risiko bencana. Pada sisi kelembagaan dapat digunakan transparansi anggaran, kualitas laporan usaha, tingkat partisipasi, dan penyelesaian pengaduan.

24. Klaster Antardesa dan Kota Kecil sebagai Hub

Tidak semua aktivitas ekonomi efisien pada skala satu desa. Karena itu pertumbuhan baru perlu didesain sebagai jaringan desa-kota kecil. Kota kecil dapat menjadi pusat pendidikan, kesehatan, pengolahan, pergudangan, jasa profesional, dan pasar, sedangkan desa memasok produk, tenaga kerja, serta pengalaman berbasis tempat. Secara konseptual, isu ini dapat dibaca melalui tiga lapis analisis. Pertama adalah lapis mikro, yaitu keputusan rumah tangga dan pelaku usaha tentang produksi, konsumsi, investasi, pendidikan, serta strategi menghadapi risiko. Kedua adalah lapis meso, yaitu kualitas pasar lokal, organisasi produsen, koperasi, BUM Desa, jejaring antardesa, dan hubungan dengan pembeli. Ketiga adalah lapis makro dan institusional, yaitu kebijakan fiskal, regulasi, sistem keuangan, perdagangan, konektivitas, dan kebijakan pembangunan wilayah. Ketiga lapis tersebut harus bergerak searah. Jika hanya satu lapis diperbaiki, hasilnya sering terbatas karena hambatan pada lapis lain tetap menahan produktivitas.

Klaster antardesa memungkinkan pembagian fungsi. Satu desa dapat unggul dalam produksi, desa lain dalam pembibitan, lainnya dalam pengolahan, sementara pusat kecamatan menyediakan logistik dan pemasaran. Kerja sama lintas batas administratif membutuhkan mekanisme koordinasi dan pembiayaan yang lebih fleksibel, tetapi manfaat skala dapat besar. Implikasi kebijakannya adalah perlunya pergeseran dari pendekatan program menuju pendekatan sistem. Program biasanya dimulai dari anggaran dan jenis kegiatan; pendekatan sistem dimulai dari masalah, tujuan ekonomi, aktor, dan mekanisme perubahan. Pertanyaan utamanya bukan 'apa yang dapat dibelanjakan tahun ini', tetapi 'hambatan apa yang menghalangi warga meningkatkan produktivitas dan pendapatan, dan kombinasi intervensi apa yang paling masuk akal untuk mengatasinya'. Orientasi seperti ini mendorong koordinasi lintas sektor serta mengurangi proyek yang berdiri sendiri tanpa hubungan dengan rantai nilai.

Dalam perspektif ekonomi inklusif, perhatian juga harus diberikan pada distribusi manfaat. Pertumbuhan lokal dapat terjadi tetapi tetap eksklusif bila aset, kontrak, informasi, dan jaringan hanya dikuasai kelompok kecil. Karena itu desain kebijakan perlu memeriksa siapa yang memperoleh pekerjaan, siapa yang memiliki aset, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang memiliki suara dalam keputusan. Kelompok miskin, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, masyarakat adat, pekerja informal, serta rumah tangga di

lokasi terpencil harus masuk dalam desain sejak awal. Inklusi bukan tambahan setelah pertumbuhan terjadi, melainkan bagian dari arsitektur pertumbuhan itu sendiri.

Dimensi lain adalah keberlanjutan. Peningkatan produksi yang menguras tanah, air, hutan, atau pesisir dapat menciptakan pendapatan sesaat tetapi memperbesar kerentanan di masa depan. Karena itu produktivitas perlu dipahami sebagai kemampuan menghasilkan nilai lebih besar dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan risiko lingkungan yang lebih rendah. Investasi dalam efisiensi air, energi bersih, diversifikasi, agroforestri, pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, dan adaptasi iklim dapat diposisikan sebagai strategi ekonomi, bukan sekadar kewajiban lingkungan.

Dari sisi manajemen, keberhasilan memerlukan pembagian peran yang jelas. Pemerintah desa berfungsi sebagai pengarah, penyedia barang publik lokal, dan fasilitator; pelaku usaha menjalankan kegiatan komersial; kelompok masyarakat mengorganisasi partisipasi dan kontrol sosial; lembaga keuangan menyediakan modal; perguruan tinggi mendukung pengetahuan; sementara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat menyediakan regulasi, konektivitas, standardisasi, dan pembiayaan yang melampaui kemampuan desa. Ketika satu aktor mengambil alih semua fungsi, sistem cenderung tidak efisien dan sulit dipertahankan.

Untuk melihat penerapannya, bayangkan sebuah desa yang memiliki satu komoditas unggulan tetapi pendapatan petani tetap rendah. Diagnosis mungkin menunjukkan bahwa masalah utama bukan kurangnya produksi, melainkan kualitas yang tidak seragam, kehilangan pascapanen, penjualan individual, dan biaya logistik. Solusi yang relevan bukan hanya subsidi input. Desa dapat mengembangkan standar panen, fasilitas pengumpulan, pencatatan mutu, pengolahan sederhana, kontrak dengan pembeli, dan pembiayaan modal kerja. Contoh ilustratif ini menunjukkan bahwa strategi pertumbuhan harus mengintervensi titik lemah yang benar-benar menentukan nilai tambah.

Setiap strategi perlu menyertakan risk register. Risiko pasar mencakup turunnya harga dan hilangnya pembeli; risiko produksi mencakup cuaca, penyakit, dan kegagalan teknologi; risiko finansial mencakup arus kas dan utang; risiko kelembagaan mencakup konflik kepentingan dan pergantian kepemimpinan; risiko sosial mencakup eksklusi kelompok lemah; risiko lingkungan mencakup degradasi sumber daya; dan risiko digital mencakup kebocoran data serta penipuan. Menyebut risiko bukan alasan untuk tidak berinovasi, tetapi cara agar inovasi dilakukan dengan disiplin.

25. Data, AI, dan Smart Village

Smart village bukan desa yang dipenuhi perangkat digital, melainkan desa yang menggunakan data dan teknologi untuk memecahkan masalah secara lebih baik. Data kependudukan, kemiskinan, usaha, komoditas, infrastruktur, lahan, cuaca, harga, dan layanan dapat diintegrasikan untuk meningkatkan kualitas keputusan. Secara konseptual, isu ini dapat dibaca melalui tiga lapis analisis. Pertama adalah lapis mikro, yaitu keputusan rumah tangga dan pelaku usaha tentang produksi, konsumsi, investasi, pendidikan, serta strategi menghadapi risiko. Kedua adalah lapis meso, yaitu kualitas pasar lokal, organisasi produsen, koperasi, BUM Desa, jejaring antardesa, dan hubungan dengan pembeli. Ketiga adalah lapis makro dan institusional, yaitu kebijakan fiskal, regulasi, sistem keuangan, perdagangan, konektivitas, dan kebijakan pembangunan wilayah. Ketiga lapis tersebut harus bergerak searah. Jika hanya satu lapis diperbaiki, hasilnya sering terbatas karena hambatan pada lapis lain tetap menahan produktivitas.

AI dapat digunakan secara sederhana untuk penerjemahan, desain promosi, analisis dokumen, pelayanan informasi, prediksi permintaan, pengenalan penyakit tanaman melalui citra, atau pembuatan materi pelatihan. Namun penerapan AI harus memperhatikan kualitas data, privasi, bias, akses, dan literasi. Teknologi seharusnya memperkuat kapasitas manusia, bukan menggantikan proses deliberasi masyarakat. Implikasi kebijakannya adalah perlunya pergeseran dari pendekatan program menuju pendekatan sistem. Program biasanya dimulai dari anggaran dan jenis kegiatan; pendekatan sistem dimulai dari masalah, tujuan ekonomi, aktor, dan mekanisme perubahan. Pertanyaan utamanya bukan 'apa yang dapat dibelanjakan tahun ini', tetapi 'hambatan apa yang menghalangi warga meningkatkan produktivitas dan pendapatan, dan kombinasi intervensi apa yang paling masuk akal untuk mengatasinya'. Orientasi seperti ini mendorong koordinasi lintas sektor serta mengurangi proyek yang berdiri sendiri tanpa hubungan dengan rantai nilai.

Dalam perspektif ekonomi inklusif, perhatian juga harus diberikan pada distribusi manfaat. Pertumbuhan lokal dapat terjadi tetapi tetap eksklusif bila aset, kontrak, informasi, dan jaringan hanya dikuasai kelompok kecil. Karena itu desain kebijakan perlu memeriksa siapa yang memperoleh pekerjaan, siapa yang memiliki aset, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang memiliki suara dalam keputusan. Kelompok miskin, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, masyarakat adat, pekerja informal, serta rumah tangga di lokasi terpencil harus masuk dalam desain sejak awal. Inklusi bukan tambahan setelah pertumbuhan terjadi, melainkan bagian dari arsitektur pertumbuhan itu sendiri.

Dimensi lain adalah keberlanjutan. Peningkatan produksi yang menguras tanah, air, hutan, atau pesisir dapat menciptakan pendapatan sesaat tetapi memperbesar kerentanan di masa depan. Karena itu produktivitas perlu dipahami sebagai kemampuan menghasilkan nilai lebih besar dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan risiko lingkungan yang lebih rendah. Investasi dalam efisiensi air, energi bersih, diversifikasi, agroforestri, pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, dan adaptasi iklim dapat diposisikan sebagai strategi ekonomi, bukan sekadar kewajiban lingkungan.

Dari sisi manajemen, keberhasilan memerlukan pembagian peran yang jelas. Pemerintah desa berfungsi sebagai pengarah, penyedia barang publik lokal, dan fasilitator; pelaku usaha menjalankan kegiatan komersial; kelompok masyarakat mengorganisasi partisipasi dan kontrol sosial; lembaga keuangan menyediakan modal; perguruan tinggi mendukung pengetahuan; sementara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat menyediakan regulasi, konektivitas, standardisasi, dan pembiayaan yang melampaui kemampuan desa. Ketika satu aktor mengambil alih semua fungsi, sistem cenderung tidak efisien dan sulit dipertahankan.

Untuk melihat penerapannya, bayangkan sebuah desa yang memiliki satu komoditas unggulan tetapi pendapatan petani tetap rendah. Diagnosis mungkin menunjukkan bahwa masalah utama bukan kurangnya produksi, melainkan kualitas yang tidak seragam, kehilangan pascapanen, penjualan individual, dan biaya logistik. Solusi yang relevan bukan hanya subsidi input. Desa dapat mengembangkan standar panen, fasilitas pengumpulan, pencatatan mutu, pengolahan sederhana, kontrak dengan pembeli, dan pembiayaan modal kerja. Contoh ilustratif ini menunjukkan bahwa strategi pertumbuhan harus mengintervensi titik lemah yang benar-benar menentukan nilai tambah.

Mekanisme transmisi menuju kesejahteraan dapat dijelaskan sebagai rantai: investasi publik dan kelembagaan menurunkan biaya transaksi; penurunan biaya meningkatkan kelayakan usaha; usaha yang lebih layak mendorong investasi swasta dan adopsi teknologi; produktivitas yang meningkat memperbesar surplus; surplus memungkinkan upah, keuntungan, dan penerimaan lokal meningkat; peningkatan pendapatan memperkuat konsumsi, tabungan, pendidikan, kesehatan, dan aset rumah tangga. Rantai ini

tidak otomatis. Bila pasar tenaga kerja lemah atau kekuatan tawar timpang, produktivitas dapat meningkat tanpa peningkatan pendapatan yang proporsional. Karena itu kualitas institusi pasar dan perlindungan sosial tetap penting.

26. Perguruan Tinggi sebagai Mitra Transformasi Desa

Perguruan tinggi dapat memainkan peran lebih strategis daripada sekadar kegiatan pengabdian jangka pendek. Kampus dapat menjadi knowledge partner yang membantu pemetaan potensi, riset pasar, desain produk, standarisasi, teknologi tepat guna, pengembangan SDM, evaluasi dampak, dan inkubasi bisnis. Secara konseptual, isu ini dapat dibaca melalui tiga lapis analisis. Pertama adalah lapis mikro, yaitu keputusan rumah tangga dan pelaku usaha tentang produksi, konsumsi, investasi, pendidikan, serta strategi menghadapi risiko. Kedua adalah lapis meso, yaitu kualitas pasar lokal, organisasi produsen, koperasi, BUM Desa, jejaring antardesa, dan hubungan dengan pembeli. Ketiga adalah lapis makro dan institusional, yaitu kebijakan fiskal, regulasi, sistem keuangan, perdagangan, konektivitas, dan kebijakan pembangunan wilayah. Ketiga lapis tersebut harus bergerak searah. Jika hanya satu lapis diperbaiki, hasilnya sering terbatas karena hambatan pada lapis lain tetap menahan produktivitas.

Model kemitraan jangka panjang perlu menghubungkan pendidikan, riset, dan pengabdian. Mahasiswa dapat bekerja dalam living laboratory desa, sedangkan dosen dan peneliti membantu membangun sistem data dan inovasi. Keberhasilan diukur dari kapasitas lokal yang bertahan setelah proyek kampus selesai, bukan dari jumlah kegiatan. Implikasi kebijakannya adalah perlunya pergeseran dari pendekatan program menuju pendekatan sistem. Program biasanya dimulai dari anggaran dan jenis kegiatan; pendekatan sistem dimulai dari masalah, tujuan ekonomi, aktor, dan mekanisme perubahan. Pertanyaan utamanya bukan 'apa yang dapat dibelanjakan tahun ini', tetapi 'hambatan apa yang menghalangi warga meningkatkan produktivitas dan pendapatan, dan kombinasi intervensi apa yang paling masuk akal untuk mengatasinya'. Orientasi seperti ini mendorong koordinasi lintas sektor serta mengurangi proyek yang berdiri sendiri tanpa hubungan dengan rantai nilai.

Dalam perspektif ekonomi inklusif, perhatian juga harus diberikan pada distribusi manfaat. Pertumbuhan lokal dapat terjadi tetapi tetap eksklusif bila aset, kontrak, informasi, dan jaringan hanya dikuasai kelompok kecil. Karena itu desain kebijakan perlu memeriksa siapa yang memperoleh pekerjaan, siapa yang memiliki aset, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang memiliki suara dalam keputusan. Kelompok miskin, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, masyarakat adat, pekerja informal, serta rumah tangga di lokasi terpencil harus masuk dalam desain sejak awal. Inklusi bukan tambahan setelah pertumbuhan terjadi, melainkan bagian dari arsitektur pertumbuhan itu sendiri.

Dimensi lain adalah keberlanjutan. Peningkatan produksi yang menguras tanah, air, hutan, atau pesisir dapat menciptakan pendapatan sesaat tetapi memperbesar kerentanan di masa depan. Karena itu produktivitas perlu dipahami sebagai kemampuan menghasilkan nilai lebih besar dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan risiko lingkungan yang lebih rendah. Investasi dalam efisiensi air, energi bersih, diversifikasi, agroforestri, pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, dan adaptasi iklim dapat diposisikan sebagai strategi ekonomi, bukan sekadar kewajiban lingkungan.

Dari sisi manajemen, keberhasilan memerlukan pembagian peran yang jelas. Pemerintah desa berfungsi sebagai pengarah, penyedia barang publik lokal, dan fasilitator; pelaku usaha menjalankan kegiatan komersial; kelompok masyarakat mengorganisasi partisipasi dan kontrol sosial; lembaga keuangan

menyediakan modal; perguruan tinggi mendukung pengetahuan; sementara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat menyediakan regulasi, konektivitas, standardisasi, dan pembiayaan yang melampaui kemampuan desa. Ketika satu aktor mengambil alih semua fungsi, sistem cenderung tidak efisien dan sulit dipertahankan.

Untuk melihat penerapannya, bayangkan sebuah desa yang memiliki satu komoditas unggulan tetapi pendapatan petani tetap rendah. Diagnosis mungkin menunjukkan bahwa masalah utama bukan kurangnya produksi, melainkan kualitas yang tidak seragam, kehilangan pascapanen, penjualan individual, dan biaya logistik. Solusi yang relevan bukan hanya subsidi input. Desa dapat mengembangkan standar panen, fasilitas pengumpulan, pencatatan mutu, pengolahan sederhana, kontrak dengan pembeli, dan pembiayaan modal kerja. Contoh ilustratif ini menunjukkan bahwa strategi pertumbuhan harus mengintervensi titik lemah yang benar-benar menentukan nilai tambah.

Indikator operasional perlu disusun dalam dashboard sederhana. Pada sisi ekonomi dapat digunakan produktivitas per pekerja, omzet usaha, nilai tambah per kilogram produk, jumlah pelanggan di luar desa, proporsi produk yang diolah lokal, dan biaya logistik. Pada sisi sosial dapat digunakan pendapatan rumah tangga, kemiskinan, partisipasi perempuan dan pemuda, akses pelatihan, serta kualitas pekerjaan. Pada sisi lingkungan dapat digunakan tutupan vegetasi, kualitas air, efisiensi energi, pengelolaan sampah, dan risiko bencana. Pada sisi kelembagaan dapat digunakan transparansi anggaran, kualitas laporan usaha, tingkat partisipasi, dan penyelesaian pengaduan.

27. Peran Sektor Swasta dan Kemitraan Rantai Nilai

Sektor swasta membawa akses pasar, teknologi, standar, dan disiplin komersial yang dibutuhkan ekonomi desa. Kemitraan dapat berbentuk contract farming, supplier development, franchising lokal, pembelian hasil, layanan digital, atau investasi bersama. Namun hubungan harus dirancang agar risiko tidak sepenuhnya dipindahkan ke petani dan UMKM. Secara konseptual, isu ini dapat dibaca melalui tiga lapis analisis. Pertama adalah lapis mikro, yaitu keputusan rumah tangga dan pelaku usaha tentang produksi, konsumsi, investasi, pendidikan, serta strategi menghadapi risiko. Kedua adalah lapis meso, yaitu kualitas pasar lokal, organisasi produsen, koperasi, BUM Desa, jejaring antardesa, dan hubungan dengan pembeli. Ketiga adalah lapis makro dan institusional, yaitu kebijakan fiskal, regulasi, sistem keuangan, perdagangan, konektivitas, dan kebijakan pembangunan wilayah. Ketiga lapis tersebut harus bergerak searah. Jika hanya satu lapis diperbaiki, hasilnya sering terbatas karena hambatan pada lapis lain tetap menahan produktivitas.

Kontrak perlu transparan mengenai kualitas, harga, volume, pembayaran, dan mekanisme sengketa. Pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator dan penjaga aturan, bukan pengganti pasar. Kemitraan yang baik membuat pelaku desa belajar, memperoleh kepastian permintaan, dan naik kelas sebagai pemasok. Implikasi kebijakannya adalah perlunya pergeseran dari pendekatan program menuju pendekatan sistem. Program biasanya dimulai dari anggaran dan jenis kegiatan; pendekatan sistem dimulai dari masalah, tujuan ekonomi, aktor, dan mekanisme perubahan. Pertanyaan utamanya bukan 'apa yang dapat dibelanjakan tahun ini', tetapi 'hambatan apa yang menghalangi warga meningkatkan produktivitas dan pendapatan, dan kombinasi intervensi apa yang paling masuk akal untuk mengatasinya'. Orientasi seperti ini mendorong koordinasi lintas sektor serta mengurangi proyek yang berdiri sendiri tanpa hubungan dengan rantai nilai.

Dalam perspektif ekonomi inklusif, perhatian juga harus diberikan pada distribusi manfaat. Pertumbuhan lokal dapat terjadi tetapi tetap eksklusif bila aset, kontrak, informasi, dan jaringan hanya dikuasai kelompok

kecil. Karena itu desain kebijakan perlu memeriksa siapa yang memperoleh pekerjaan, siapa yang memiliki aset, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang memiliki suara dalam keputusan. Kelompok miskin, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, masyarakat adat, pekerja informal, serta rumah tangga di lokasi terpencil harus masuk dalam desain sejak awal. Inklusi bukan tambahan setelah pertumbuhan terjadi, melainkan bagian dari arsitektur pertumbuhan itu sendiri.

Dimensi lain adalah keberlanjutan. Peningkatan produksi yang menguras tanah, air, hutan, atau pesisir dapat menciptakan pendapatan sesaat tetapi memperbesar kerentanan di masa depan. Karena itu produktivitas perlu dipahami sebagai kemampuan menghasilkan nilai lebih besar dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan risiko lingkungan yang lebih rendah. Investasi dalam efisiensi air, energi bersih, diversifikasi, agroforestri, pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, dan adaptasi iklim dapat diposisikan sebagai strategi ekonomi, bukan sekadar kewajiban lingkungan.

Dari sisi manajemen, keberhasilan memerlukan pembagian peran yang jelas. Pemerintah desa berfungsi sebagai pengarah, penyedia barang publik lokal, dan fasilitator; pelaku usaha menjalankan kegiatan komersial; kelompok masyarakat mengorganisasi partisipasi dan kontrol sosial; lembaga keuangan menyediakan modal; perguruan tinggi mendukung pengetahuan; sementara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat menyediakan regulasi, konektivitas, standardisasi, dan pembiayaan yang melampaui kemampuan desa. Ketika satu aktor mengambil alih semua fungsi, sistem cenderung tidak efisien dan sulit dipertahankan.

Untuk melihat penerapannya, bayangkan sebuah desa yang memiliki satu komoditas unggulan tetapi pendapatan petani tetap rendah. Diagnosis mungkin menunjukkan bahwa masalah utama bukan kurangnya produksi, melainkan kualitas yang tidak seragam, kehilangan pascapanen, penjualan individual, dan biaya logistik. Solusi yang relevan bukan hanya subsidi input. Desa dapat mengembangkan standar panen, fasilitas pengumpulan, pencatatan mutu, pengolahan sederhana, kontrak dengan pembeli, dan pembiayaan modal kerja. Contoh ilustratif ini menunjukkan bahwa strategi pertumbuhan harus mengintervensi titik lemah yang benar-benar menentukan nilai tambah.

Setiap strategi perlu menyertakan risk register. Risiko pasar mencakup turunnya harga dan hilangnya pembeli; risiko produksi mencakup cuaca, penyakit, dan kegagalan teknologi; risiko finansial mencakup arus kas dan utang; risiko kelembagaan mencakup konflik kepentingan dan pergantian kepemimpinan; risiko sosial mencakup eksklusi kelompok lemah; risiko lingkungan mencakup degradasi sumber daya; dan risiko digital mencakup kebocoran data serta penipuan. Menyebut risiko bukan alasan untuk tidak berinovasi, tetapi cara agar inovasi dilakukan dengan disiplin.

28. Risiko: Elite Capture, Proyekisme, dan Ketergantungan

Desentralisasi sumber daya dapat menghasilkan inovasi, tetapi juga membuka risiko elite capture, konflik kepentingan, proyek yang tidak relevan, dan ketergantungan pada transfer. Risiko meningkat ketika informasi tidak transparan, partisipasi formalistik, atau kapasitas audit lemah. Secara konseptual, isu ini dapat dibaca melalui tiga lapis analisis. Pertama adalah lapis mikro, yaitu keputusan rumah tangga dan pelaku usaha tentang produksi, konsumsi, investasi, pendidikan, serta strategi menghadapi risiko. Kedua adalah lapis meso, yaitu kualitas pasar lokal, organisasi produsen, koperasi, BUM Desa, jejaring antardesa, dan hubungan dengan pembeli. Ketiga adalah lapis makro dan institusional, yaitu kebijakan fiskal, regulasi, sistem keuangan, perdagangan, konektivitas, dan kebijakan pembangunan wilayah. Ketiga lapis tersebut

harus bergerak searah. Jika hanya satu lapis diperbaiki, hasilnya sering terbatas karena hambatan pada lapis lain tetap menahan produktivitas.

Mitigasi memerlukan keterbukaan data, indikator kinerja, audit sosial, pembatasan konflik kepentingan, evaluasi pascaprojek, serta publikasi laporan BUM Desa. Proyek harus memiliki rencana operasi dan pemeliharaan. Jika suatu aset tidak memiliki operator, model pendapatan, atau anggaran perawatan, keberlanjutannya perlu dipertanyakan sebelum dibangun. Implikasi kebijakannya adalah perlunya pergeseran dari pendekatan program menuju pendekatan sistem. Program biasanya dimulai dari anggaran dan jenis kegiatan; pendekatan sistem dimulai dari masalah, tujuan ekonomi, aktor, dan mekanisme perubahan. Pertanyaan utamanya bukan 'apa yang dapat dibelanjakan tahun ini', tetapi 'hambatan apa yang menghalangi warga meningkatkan produktivitas dan pendapatan, dan kombinasi intervensi apa yang paling masuk akal untuk mengatasinya'. Orientasi seperti ini mendorong koordinasi lintas sektor serta mengurangi proyek yang berdiri sendiri tanpa hubungan dengan rantai nilai.

Dalam perspektif ekonomi inklusif, perhatian juga harus diberikan pada distribusi manfaat. Pertumbuhan lokal dapat terjadi tetapi tetap eksklusif bila aset, kontrak, informasi, dan jaringan hanya dikuasai kelompok kecil. Karena itu desain kebijakan perlu memeriksa siapa yang memperoleh pekerjaan, siapa yang memiliki aset, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang memiliki suara dalam keputusan. Kelompok miskin, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, masyarakat adat, pekerja informal, serta rumah tangga di lokasi terpencil harus masuk dalam desain sejak awal. Inklusi bukan tambahan setelah pertumbuhan terjadi, melainkan bagian dari arsitektur pertumbuhan itu sendiri.

Dimensi lain adalah keberlanjutan. Peningkatan produksi yang menguras tanah, air, hutan, atau pesisir dapat menciptakan pendapatan sesaat tetapi memperbesar kerentanan di masa depan. Karena itu produktivitas perlu dipahami sebagai kemampuan menghasilkan nilai lebih besar dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan risiko lingkungan yang lebih rendah. Investasi dalam efisiensi air, energi bersih, diversifikasi, agroforestri, pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, dan adaptasi iklim dapat diposisikan sebagai strategi ekonomi, bukan sekadar kewajiban lingkungan.

Dari sisi manajemen, keberhasilan memerlukan pembagian peran yang jelas. Pemerintah desa berfungsi sebagai pengarah, penyedia barang publik lokal, dan fasilitator; pelaku usaha menjalankan kegiatan komersial; kelompok masyarakat mengorganisasi partisipasi dan kontrol sosial; lembaga keuangan menyediakan modal; perguruan tinggi mendukung pengetahuan; sementara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat menyediakan regulasi, konektivitas, standardisasi, dan pembiayaan yang melampaui kemampuan desa. Ketika satu aktor mengambil alih semua fungsi, sistem cenderung tidak efisien dan sulit dipertahankan.

Untuk melihat penerapannya, bayangkan sebuah desa yang memiliki satu komoditas unggulan tetapi pendapatan petani tetap rendah. Diagnosis mungkin menunjukkan bahwa masalah utama bukan kurangnya produksi, melainkan kualitas yang tidak seragam, kehilangan pascapanen, penjualan individual, dan biaya logistik. Solusi yang relevan bukan hanya subsidi input. Desa dapat mengembangkan standar panen, fasilitas pengumpulan, pencatatan mutu, pengolahan sederhana, kontrak dengan pembeli, dan pembiayaan modal kerja. Contoh ilustratif ini menunjukkan bahwa strategi pertumbuhan harus mengintervensi titik lemah yang benar-benar menentukan nilai tambah.

Mekanisme transmisi menuju kesejahteraan dapat dijelaskan sebagai rantai: investasi publik dan kelembagaan menurunkan biaya transaksi; penurunan biaya meningkatkan kelayakan usaha; usaha yang lebih layak mendorong investasi swasta dan adopsi teknologi; produktivitas yang meningkat memperbesar

surplus; surplus memungkinkan upah, keuntungan, dan penerimaan lokal meningkat; peningkatan pendapatan memperkuat konsumsi, tabungan, pendidikan, kesehatan, dan aset rumah tangga. Rantai ini tidak otomatis. Bila pasar tenaga kerja lemah atau kekuatan tawar timpang, produktivitas dapat meningkat tanpa peningkatan pendapatan yang proporsional. Karena itu kualitas institusi pasar dan perlindungan sosial tetap penting.

29. Kerangka Implementasi: Dari Pemetaan Potensi ke Portofolio Investasi

Transformasi desa sebaiknya dimulai dengan diagnosis, bukan daftar proyek. Langkah pertama adalah memetakan aset dan masalah; kedua, memilih rantai nilai prioritas; ketiga, mengidentifikasi bottleneck; keempat, menyusun portofolio intervensi; kelima, menetapkan aktor dan pembiayaan; keenam, membangun indikator; ketujuh, melakukan evaluasi dan adaptasi. Secara konseptual, isu ini dapat dibaca melalui tiga lapis analisis. Pertama adalah lapis mikro, yaitu keputusan rumah tangga dan pelaku usaha tentang produksi, konsumsi, investasi, pendidikan, serta strategi menghadapi risiko. Kedua adalah lapis meso, yaitu kualitas pasar lokal, organisasi produsen, koperasi, BUM Desa, jejaring antardesa, dan hubungan dengan pembeli. Ketiga adalah lapis makro dan institusional, yaitu kebijakan fiskal, regulasi, sistem keuangan, perdagangan, konektivitas, dan kebijakan pembangunan wilayah. Ketiga lapis tersebut harus bergerak searah. Jika hanya satu lapis diperbaiki, hasilnya sering terbatas karena hambatan pada lapis lain tetap menahan produktivitas.

Portofolio investasi menghindari ketergantungan pada satu proyek besar. Sebuah desa kopi, misalnya, dapat membutuhkan kombinasi jalan usaha tani, pelatihan pascapanen, mesin bersama, sertifikasi, merek, kontrak pembeli, internet, dan pembiayaan modal kerja. Efek timbul dari komplementaritas intervensi, bukan dari satu fasilitas tunggal. Implikasi kebijakannya adalah perlunya pergeseran dari pendekatan program menuju pendekatan sistem. Program biasanya dimulai dari anggaran dan jenis kegiatan; pendekatan sistem dimulai dari masalah, tujuan ekonomi, aktor, dan mekanisme perubahan. Pertanyaan utamanya bukan 'apa yang dapat dibelanjakan tahun ini', tetapi 'hambatan apa yang menghalangi warga meningkatkan produktivitas dan pendapatan, dan kombinasi intervensi apa yang paling masuk akal untuk mengatasinya'. Orientasi seperti ini mendorong koordinasi lintas sektor serta mengurangi proyek yang berdiri sendiri tanpa hubungan dengan rantai nilai.

Dalam perspektif ekonomi inklusif, perhatian juga harus diberikan pada distribusi manfaat. Pertumbuhan lokal dapat terjadi tetapi tetap eksklusif bila aset, kontrak, informasi, dan jaringan hanya dikuasai kelompok kecil. Karena itu desain kebijakan perlu memeriksa siapa yang memperoleh pekerjaan, siapa yang memiliki aset, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang memiliki suara dalam keputusan. Kelompok miskin, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, masyarakat adat, pekerja informal, serta rumah tangga di lokasi terpencil harus masuk dalam desain sejak awal. Inklusi bukan tambahan setelah pertumbuhan terjadi, melainkan bagian dari arsitektur pertumbuhan itu sendiri.

Dimensi lain adalah keberlanjutan. Peningkatan produksi yang menguras tanah, air, hutan, atau pesisir dapat menciptakan pendapatan sesaat tetapi memperbesar kerentanan di masa depan. Karena itu produktivitas perlu dipahami sebagai kemampuan menghasilkan nilai lebih besar dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan risiko lingkungan yang lebih rendah. Investasi dalam efisiensi air, energi bersih, diversifikasi, agroforestri, pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, dan adaptasi iklim dapat diposisikan sebagai strategi ekonomi, bukan sekadar kewajiban lingkungan.

Dari sisi manajemen, keberhasilan memerlukan pembagian peran yang jelas. Pemerintah desa berfungsi sebagai pengarah, penyedia barang publik lokal, dan fasilitator; pelaku usaha menjalankan kegiatan komersial; kelompok masyarakat mengorganisasi partisipasi dan kontrol sosial; lembaga keuangan menyediakan modal; perguruan tinggi mendukung pengetahuan; sementara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat menyediakan regulasi, konektivitas, standardisasi, dan pembiayaan yang melampaui kemampuan desa. Ketika satu aktor mengambil alih semua fungsi, sistem cenderung tidak efisien dan sulit dipertahankan.

Untuk melihat penerapannya, bayangkan sebuah desa yang memiliki satu komoditas unggulan tetapi pendapatan petani tetap rendah. Diagnosis mungkin menunjukkan bahwa masalah utama bukan kurangnya produksi, melainkan kualitas yang tidak seragam, kehilangan pascapanen, penjualan individual, dan biaya logistik. Solusi yang relevan bukan hanya subsidi input. Desa dapat mengembangkan standar panen, fasilitas pengumpulan, pencatatan mutu, pengolahan sederhana, kontrak dengan pembeli, dan pembiayaan modal kerja. Contoh ilustratif ini menunjukkan bahwa strategi pertumbuhan harus mengintervensi titik lemah yang benar-benar menentukan nilai tambah.

Indikator operasional perlu disusun dalam dashboard sederhana. Pada sisi ekonomi dapat digunakan produktivitas per pekerja, omzet usaha, nilai tambah per kilogram produk, jumlah pelanggan di luar desa, proporsi produk yang diolah lokal, dan biaya logistik. Pada sisi sosial dapat digunakan pendapatan rumah tangga, kemiskinan, partisipasi perempuan dan pemuda, akses pelatihan, serta kualitas pekerjaan. Pada sisi lingkungan dapat digunakan tutupan vegetasi, kualitas air, efisiensi energi, pengelolaan sampah, dan risiko bencana. Pada sisi kelembagaan dapat digunakan transparansi anggaran, kualitas laporan usaha, tingkat partisipasi, dan penyelesaian pengaduan.

30. Roadmap 2026-2035: Desa sebagai Mesin Pertumbuhan Inklusif

Dalam jangka pendek, prioritas 2026-2027 adalah memperkuat data desa, memetakan rantai nilai, meningkatkan tata kelola BUM Desa/koperasi, dan menutup kesenjangan infrastruktur kritis. Pada 2028-2030 fokus dapat bergeser pada kluster produksi, hilirisasi lokal, digitalisasi usaha, standardisasi, green jobs, dan koneksi ke pasar nasional. Pada 2031-2035, desa yang telah matang dapat masuk ke jaringan ekspor, ekonomi pengetahuan, jasa lingkungan, dan inovasi berbasis teknologi. Secara konseptual, isu ini dapat dibaca melalui tiga lapis analisis. Pertama adalah lapis mikro, yaitu keputusan rumah tangga dan pelaku usaha tentang produksi, konsumsi, investasi, pendidikan, serta strategi menghadapi risiko. Kedua adalah lapis meso, yaitu kualitas pasar lokal, organisasi produsen, koperasi, BUM Desa, jejaring antardesa, dan hubungan dengan pembeli. Ketiga adalah lapis makro dan institusional, yaitu kebijakan fiskal, regulasi, sistem keuangan, perdagangan, konektivitas, dan kebijakan pembangunan wilayah. Ketiga lapis tersebut harus bergerak searah. Jika hanya satu lapis diperbaiki, hasilnya sering terbatas karena hambatan pada lapis lain tetap menahan produktivitas.

Roadmap harus memiliki prinsip adaptif. Desa yang berhasil tidak dipaksa mengikuti tahapan yang sama, sedangkan desa tertinggal perlu afirmasi lebih kuat. Tujuan akhirnya adalah membangun struktur ekonomi yang membuat peningkatan produktivitas diterjemahkan menjadi pendapatan, kualitas pekerjaan, layanan, dan ketahanan rumah tangga. Implikasi kebijakannya adalah perlunya pergeseran dari pendekatan program menuju pendekatan sistem. Program biasanya dimulai dari anggaran dan jenis kegiatan; pendekatan sistem dimulai dari masalah, tujuan ekonomi, aktor, dan mekanisme perubahan. Pertanyaan utamanya bukan 'apa yang dapat dibelanjakan tahun ini', tetapi 'hambatan apa yang menghalangi warga meningkatkan

produktivitas dan pendapatan, dan kombinasi intervensi apa yang paling masuk akal untuk mengatasinya'. Orientasi seperti ini mendorong koordinasi lintas sektor serta mengurangi proyek yang berdiri sendiri tanpa hubungan dengan rantai nilai.

Dalam perspektif ekonomi inklusif, perhatian juga harus diberikan pada distribusi manfaat. Pertumbuhan lokal dapat terjadi tetapi tetap eksklusif bila aset, kontrak, informasi, dan jaringan hanya dikuasai kelompok kecil. Karena itu desain kebijakan perlu memeriksa siapa yang memperoleh pekerjaan, siapa yang memiliki aset, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang memiliki suara dalam keputusan. Kelompok miskin, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, masyarakat adat, pekerja informal, serta rumah tangga di lokasi terpencil harus masuk dalam desain sejak awal. Inklusi bukan tambahan setelah pertumbuhan terjadi, melainkan bagian dari arsitektur pertumbuhan itu sendiri.

Dimensi lain adalah keberlanjutan. Peningkatan produksi yang menguras tanah, air, hutan, atau pesisir dapat menciptakan pendapatan sesaat tetapi memperbesar kerentanan di masa depan. Karena itu produktivitas perlu dipahami sebagai kemampuan menghasilkan nilai lebih besar dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan risiko lingkungan yang lebih rendah. Investasi dalam efisiensi air, energi bersih, diversifikasi, agroforestri, pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, dan adaptasi iklim dapat diposisikan sebagai strategi ekonomi, bukan sekadar kewajiban lingkungan.

Dari sisi manajemen, keberhasilan memerlukan pembagian peran yang jelas. Pemerintah desa berfungsi sebagai pengarah, penyedia barang publik lokal, dan fasilitator; pelaku usaha menjalankan kegiatan komersial; kelompok masyarakat mengorganisasi partisipasi dan kontrol sosial; lembaga keuangan menyediakan modal; perguruan tinggi mendukung pengetahuan; sementara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat menyediakan regulasi, konektivitas, standardisasi, dan pembiayaan yang melampaui kemampuan desa. Ketika satu aktor mengambil alih semua fungsi, sistem cenderung tidak efisien dan sulit dipertahankan.

Untuk melihat penerapannya, bayangkan sebuah desa yang memiliki satu komoditas unggulan tetapi pendapatan petani tetap rendah. Diagnosis mungkin menunjukkan bahwa masalah utama bukan kurangnya produksi, melainkan kualitas yang tidak seragam, kehilangan pascapanen, penjualan individual, dan biaya logistik. Solusi yang relevan bukan hanya subsidi input. Desa dapat mengembangkan standar panen, fasilitas pengumpulan, pencatatan mutu, pengolahan sederhana, kontrak dengan pembeli, dan pembiayaan modal kerja. Contoh ilustratif ini menunjukkan bahwa strategi pertumbuhan harus mengintervensi titik lemah yang benar-benar menentukan nilai tambah.

Setiap strategi perlu menyertakan risk register. Risiko pasar mencakup turunnya harga dan hilangnya pembeli; risiko produksi mencakup cuaca, penyakit, dan kegagalan teknologi; risiko finansial mencakup arus kas dan utang; risiko kelembagaan mencakup konflik kepentingan dan pergantian kepemimpinan; risiko sosial mencakup eksklusi kelompok lemah; risiko lingkungan mencakup degradasi sumber daya; dan risiko digital mencakup kebocoran data serta penipuan. Menyebut risiko bukan alasan untuk tidak berinovasi, tetapi cara agar inovasi dilakukan dengan disiplin.

31. Mengukur Keberhasilan: Dari Output ke Outcome dan Impact

Ukuran keberhasilan pembangunan desa sering berhenti pada jumlah jalan, pelatihan, bantuan, atau unit usaha. Indikator tersebut penting sebagai output, tetapi tidak cukup. Outcome yang lebih relevan adalah penurunan biaya logistik, peningkatan produktivitas, omzet, pendapatan, jumlah pekerjaan layak,

partisipasi perempuan, diversifikasi usaha, serta akses layanan. Secara konseptual, isu ini dapat dibaca melalui tiga lapis analisis. Pertama adalah lapis mikro, yaitu keputusan rumah tangga dan pelaku usaha tentang produksi, konsumsi, investasi, pendidikan, serta strategi menghadapi risiko. Kedua adalah lapis meso, yaitu kualitas pasar lokal, organisasi produsen, koperasi, BUM Desa, jejaring antardesa, dan hubungan dengan pembeli. Ketiga adalah lapis makro dan institusional, yaitu kebijakan fiskal, regulasi, sistem keuangan, perdagangan, konektivitas, dan kebijakan pembangunan wilayah. Ketiga lapis tersebut harus bergerak searah. Jika hanya satu lapis diperbaiki, hasilnya sering terbatas karena hambatan pada lapis lain tetap menahan produktivitas.

Pada tingkat impact, pemerintah perlu menilai penurunan kemiskinan, peningkatan mobilitas ekonomi, ketahanan terhadap guncangan, kualitas lingkungan, dan berkurangnya kesenjangan wilayah. Pengukuran harus menggunakan baseline dan membandingkan perubahan dari waktu ke waktu. Sistem indikator yang baik mencegah program mengejar aktivitas tanpa hasil. Implikasi kebijakannya adalah perlunya pergeseran dari pendekatan program menuju pendekatan sistem. Program biasanya dimulai dari anggaran dan jenis kegiatan; pendekatan sistem dimulai dari masalah, tujuan ekonomi, aktor, dan mekanisme perubahan. Pertanyaan utamanya bukan 'apa yang dapat dibelanjakan tahun ini', tetapi 'hambatan apa yang menghalangi warga meningkatkan produktivitas dan pendapatan, dan kombinasi intervensi apa yang paling masuk akal untuk mengatasinya'. Orientasi seperti ini mendorong koordinasi lintas sektor serta mengurangi proyek yang berdiri sendiri tanpa hubungan dengan rantai nilai.

Dalam perspektif ekonomi inklusif, perhatian juga harus diberikan pada distribusi manfaat. Pertumbuhan lokal dapat terjadi tetapi tetap eksklusif bila aset, kontrak, informasi, dan jaringan hanya dikuasai kelompok kecil. Karena itu desain kebijakan perlu memeriksa siapa yang memperoleh pekerjaan, siapa yang memiliki aset, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang memiliki suara dalam keputusan. Kelompok miskin, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, masyarakat adat, pekerja informal, serta rumah tangga di lokasi terpencil harus masuk dalam desain sejak awal. Inklusi bukan tambahan setelah pertumbuhan terjadi, melainkan bagian dari arsitektur pertumbuhan itu sendiri.

Dimensi lain adalah keberlanjutan. Peningkatan produksi yang menguras tanah, air, hutan, atau pesisir dapat menciptakan pendapatan sesaat tetapi memperbesar kerentanan di masa depan. Karena itu produktivitas perlu dipahami sebagai kemampuan menghasilkan nilai lebih besar dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan risiko lingkungan yang lebih rendah. Investasi dalam efisiensi air, energi bersih, diversifikasi, agroforestri, pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, dan adaptasi iklim dapat diposisikan sebagai strategi ekonomi, bukan sekadar kewajiban lingkungan.

Dari sisi manajemen, keberhasilan memerlukan pembagian peran yang jelas. Pemerintah desa berfungsi sebagai pengarah, penyedia barang publik lokal, dan fasilitator; pelaku usaha menjalankan kegiatan komersial; kelompok masyarakat mengorganisasi partisipasi dan kontrol sosial; lembaga keuangan menyediakan modal; perguruan tinggi mendukung pengetahuan; sementara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat menyediakan regulasi, konektivitas, standardisasi, dan pembiayaan yang melampaui kemampuan desa. Ketika satu aktor mengambil alih semua fungsi, sistem cenderung tidak efisien dan sulit dipertahankan.

Untuk melihat penerapannya, bayangkan sebuah desa yang memiliki satu komoditas unggulan tetapi pendapatan petani tetap rendah. Diagnosis mungkin menunjukkan bahwa masalah utama bukan kurangnya produksi, melainkan kualitas yang tidak seragam, kehilangan pascapanen, penjualan individual, dan biaya logistik. Solusi yang relevan bukan hanya subsidi input. Desa dapat mengembangkan standar panen,

fasilitas pengumpulan, pencatatan mutu, pengolahan sederhana, kontrak dengan pembeli, dan pembiayaan modal kerja. Contoh ilustratif ini menunjukkan bahwa strategi pertumbuhan harus mengintervensi titik lemah yang benar-benar menentukan nilai tambah.

Mekanisme transmisi menuju kesejahteraan dapat dijelaskan sebagai rantai: investasi publik dan kelembagaan menurunkan biaya transaksi; penurunan biaya meningkatkan kelayakan usaha; usaha yang lebih layak mendorong investasi swasta dan adopsi teknologi; produktivitas yang meningkat memperbesar surplus; surplus memungkinkan upah, keuntungan, dan penerimaan lokal meningkat; peningkatan pendapatan memperkuat konsumsi, tabungan, pendidikan, kesehatan, dan aset rumah tangga. Rantai ini tidak otomatis. Bila pasar tenaga kerja lemah atau kekuatan tawar timpang, produktivitas dapat meningkat tanpa peningkatan pendapatan yang proporsional. Karena itu kualitas institusi pasar dan perlindungan sosial tetap penting.

32. Kesimpulan: Dari Desa Penyangga menjadi Desa Penggerak

Desa sebagai pusat pertumbuhan baru bukan slogan untuk memindahkan pusat kota ke desa, melainkan strategi membangun jaringan ekonomi nasional yang lebih tersebar, tahan guncangan, dan inklusif. Desa tetap memiliki karakter perdesaan, tetapi memperoleh kapasitas untuk menghasilkan nilai tambah, mengakses pasar, mengadopsi teknologi, dan memberikan kualitas hidup yang lebih baik kepada warganya. Secara konseptual, isu ini dapat dibaca melalui tiga lapis analisis. Pertama adalah lapis mikro, yaitu keputusan rumah tangga dan pelaku usaha tentang produksi, konsumsi, investasi, pendidikan, serta strategi menghadapi risiko. Kedua adalah lapis meso, yaitu kualitas pasar lokal, organisasi produsen, koperasi, BUM Desa, jejaring antardesa, dan hubungan dengan pembeli. Ketiga adalah lapis makro dan institusional, yaitu kebijakan fiskal, regulasi, sistem keuangan, perdagangan, konektivitas, dan kebijakan pembangunan wilayah. Ketiga lapis tersebut harus bergerak searah. Jika hanya satu lapis diperbaiki, hasilnya sering terbatas karena hambatan pada lapis lain tetap menahan produktivitas.

Pemulihan ekonomi Indonesia akan lebih kuat bila pertumbuhan tidak terkonsentrasi pada sedikit kawasan. Dana Desa, BUM Desa, koperasi, UMKM, pertanian modern, hilirisasi, konektivitas, pendidikan, digitalisasi, dan ekonomi hijau perlu dipadukan. Desa yang produktif bukan antitesis kota; ia merupakan mitra dalam sistem wilayah. Ketika desa tumbuh, kota kecil menguat, rantai pasok membaik, permintaan domestik meningkat, dan manfaat pembangunan menjadi lebih merata. Implikasi kebijakannya adalah perlunya pergeseran dari pendekatan program menuju pendekatan sistem. Program biasanya dimulai dari anggaran dan jenis kegiatan; pendekatan sistem dimulai dari masalah, tujuan ekonomi, aktor, dan mekanisme perubahan. Pertanyaan utamanya bukan 'apa yang dapat dibelanjakan tahun ini', tetapi 'hambatan apa yang menghalangi warga meningkatkan produktivitas dan pendapatan, dan kombinasi intervensi apa yang paling masuk akal untuk mengatasinya'. Orientasi seperti ini mendorong koordinasi lintas sektor serta mengurangi proyek yang berdiri sendiri tanpa hubungan dengan rantai nilai.

Dalam perspektif ekonomi inklusif, perhatian juga harus diberikan pada distribusi manfaat. Pertumbuhan lokal dapat terjadi tetapi tetap eksklusif bila aset, kontrak, informasi, dan jaringan hanya dikuasai kelompok kecil. Karena itu desain kebijakan perlu memeriksa siapa yang memperoleh pekerjaan, siapa yang memiliki aset, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang memiliki suara dalam keputusan. Kelompok miskin, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, masyarakat adat, pekerja informal, serta rumah tangga di lokasi terpencil harus masuk dalam desain sejak awal. Inklusi bukan tambahan setelah pertumbuhan terjadi, melainkan bagian dari arsitektur pertumbuhan itu sendiri.

Dimensi lain adalah keberlanjutan. Peningkatan produksi yang menguras tanah, air, hutan, atau pesisir dapat menciptakan pendapatan sesaat tetapi memperbesar kerentanan di masa depan. Karena itu produktivitas perlu dipahami sebagai kemampuan menghasilkan nilai lebih besar dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan risiko lingkungan yang lebih rendah. Investasi dalam efisiensi air, energi bersih, diversifikasi, agroforestri, pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, dan adaptasi iklim dapat diposisikan sebagai strategi ekonomi, bukan sekadar kewajiban lingkungan.

Dari sisi manajemen, keberhasilan memerlukan pembagian peran yang jelas. Pemerintah desa berfungsi sebagai pengarah, penyedia barang publik lokal, dan fasilitator; pelaku usaha menjalankan kegiatan komersial; kelompok masyarakat mengorganisasi partisipasi dan kontrol sosial; lembaga keuangan menyediakan modal; perguruan tinggi mendukung pengetahuan; sementara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat menyediakan regulasi, konektivitas, standardisasi, dan pembiayaan yang melampaui kemampuan desa. Ketika satu aktor mengambil alih semua fungsi, sistem cenderung tidak efisien dan sulit dipertahankan.

Untuk melihat penerapannya, bayangkan sebuah desa yang memiliki satu komoditas unggulan tetapi pendapatan petani tetap rendah. Diagnosis mungkin menunjukkan bahwa masalah utama bukan kurangnya produksi, melainkan kualitas yang tidak seragam, kehilangan pascapanen, penjualan individual, dan biaya logistik. Solusi yang relevan bukan hanya subsidi input. Desa dapat mengembangkan standar panen, fasilitas pengumpulan, pencatatan mutu, pengolahan sederhana, kontrak dengan pembeli, dan pembiayaan modal kerja. Contoh ilustratif ini menunjukkan bahwa strategi pertumbuhan harus mengintervensi titik lemah yang benar-benar menentukan nilai tambah.

Indikator operasional perlu disusun dalam dashboard sederhana. Pada sisi ekonomi dapat digunakan produktivitas per pekerja, omzet usaha, nilai tambah per kilogram produk, jumlah pelanggan di luar desa, proporsi produk yang diolah lokal, dan biaya logistik. Pada sisi sosial dapat digunakan pendapatan rumah tangga, kemiskinan, partisipasi perempuan dan pemuda, akses pelatihan, serta kualitas pekerjaan. Pada sisi lingkungan dapat digunakan tutupan vegetasi, kualitas air, efisiensi energi, pengelolaan sampah, dan risiko bencana. Pada sisi kelembagaan dapat digunakan transparansi anggaran, kualitas laporan usaha, tingkat partisipasi, dan penyelesaian pengaduan.

Matriks Strategi Desa sebagai Pusat Pertumbuhan

Pilar	Intervensi Kunci	Outcome	Indikator Contoh
Produktivitas	Teknologi, penyuluhan, pascapanen, standardisasi	Nilai tambah meningkat	Produktivitas/pekerja; susut pascapanen
UMKM & kelembagaan	BUM Desa, koperasi, inkubasi, pembiayaan	Usaha naik kelas	Omzet; survival rate; pekerjaan
Konektivitas	Jalan, logistik, internet, layanan digital	Biaya transaksi turun	Biaya angkut; kecepatan internet
SDM	TVET, reskilling, digital literacy	Keterampilan sesuai pasar	Penempatan kerja; sertifikasi

Inklusi	Akses perempuan, pemuda, kelompok rentan	Manfaat lebih merata	Partisipasi; distribusi pendapatan
Hijau	Agroforestri, energi bersih, sirkular	Pendapatan + ketahanan ekologi	Green jobs; indikator lingkungan
Tata kelola	Data, transparansi, audit sosial	Kepercayaan dan efektivitas	Kualitas laporan; pengaduan

Glossarium

Agroindustri: Kegiatan pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah, daya simpan, mutu, dan akses pasar.

Agroforestri: Sistem penggunaan lahan yang mengombinasikan tanaman kehutanan dengan pertanian dan/atau peternakan untuk tujuan ekonomi dan ekologis.

BUM Desa: Badan Usaha Milik Desa, lembaga usaha yang dibentuk desa untuk mengelola aset, jasa, dan kegiatan ekonomi sesuai peraturan.

Cold chain: Rantai dingin berupa sistem penyimpanan dan transportasi bersuhu terkontrol bagi produk yang mudah rusak.

Digital divide: Kesenjangan akses, kualitas koneksi, perangkat, keterampilan, dan kemampuan memanfaatkan teknologi digital.

Economic multiplier: Efek pengganda ketika tambahan pendapatan atau belanja memicu transaksi lanjutan dalam ekonomi lokal.

Elite capture: Situasi ketika manfaat, sumber daya, atau keputusan publik secara tidak proporsional dikuasai kelompok berpengaruh.

Green jobs: Pekerjaan yang berkontribusi pada pelestarian atau pemulihan lingkungan dan memenuhi prinsip pekerjaan yang layak.

Hilirisasi: Proses meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan, diferensiasi produk, standardisasi, dan kegiatan rantai nilai setelah produksi primer.

Inklusi ekonomi: Kondisi ketika kelompok masyarakat yang berbeda memiliki peluang nyata berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari kegiatan ekonomi.

Klaster: Konsentrasi atau jejaring pelaku usaha dan institusi yang saling terhubung dalam kegiatan ekonomi tertentu.

Koperasi: Badan usaha berbasis keanggotaan yang mengorganisasi kegiatan ekonomi bersama berdasarkan prinsip koperasi.

Place-based development: Pendekatan pembangunan yang menyesuaikan kebijakan dengan karakter, aset, institusi, dan tantangan spesifik suatu tempat.

Produktivitas: Kemampuan menghasilkan output atau nilai tambah relatif terhadap input yang digunakan.

Resiliensi: Kemampuan sistem ekonomi dan sosial untuk bertahan, menyesuaikan diri, dan pulih dari guncangan.

Smart village: Pendekatan pembangunan desa yang menggunakan data, teknologi, inovasi, dan partisipasi untuk meningkatkan layanan dan produktivitas.

Social capital: Sumber daya yang berasal dari kepercayaan, norma, dan jaringan sosial yang memfasilitasi kerja sama.

Traceability: Kemampuan menelusuri asal-usul, proses, dan pergerakan produk sepanjang rantai pasok.

Value chain: Rangkaian kegiatan yang membentuk nilai produk atau jasa dari input, produksi, pengolahan, distribusi, hingga konsumen.

Value added: Nilai yang ditambahkan melalui suatu tahap produksi, pengolahan, layanan, desain, atau distribusi.

Daftar Pustaka

- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village governance, community life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161–183. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047>
- Badan Pusat Statistik. (2026a, February 5). Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen. BPS-Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2026b, May 5). Ekonomi Indonesia triwulan I-2026 tumbuh 5,61 persen (y-on-y). BPS-Statistics Indonesia.
- Barca, F., McCann, P., & Rodríguez-Pose, A. (2012). The case for regional development intervention: Place-based versus place-neutral approaches. *Journal of Regional Science*, 52(1), 134–152. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9787.2011.00756.x>
- Ellis, F., & Biggs, S. (2001). Evolving themes in rural development 1950s–2000s. *Development Policy Review*, 19(4), 437–448. <https://doi.org/10.1111/1467-7679.00143>
- Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. (2026a). Indeks Desa. Portal Satu Data Kemendesa PDT.
- Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. (2026b, May 13). Direktorat Jenderal PDP dorong pembangunan hijau berbasis desa melalui pendekatan SIGAP.
- Lewis, B. D. (2015). Decentralising to villages in Indonesia: Money (and other) mistakes. *Public Administration and Development*, 35(5), 347–359. <https://doi.org/10.1002/pad.1741>
- OECD. (2024). Getting to services in towns and villages: Preparing regions for demographic change. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/df1e9b88-en>
- OECD. (2025). Agricultural policy monitoring and evaluation 2025: Indonesia. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/a80ac398-en>
- Pato, M. L., & Teixeira, A. A. C. (2016). Twenty years of rural entrepreneurship: A bibliometric survey. *Sociologia Ruralis*, 56(1), 3–28. <https://doi.org/10.1111/soru.12058>
- Rodríguez-Pose, A. (2018). The revenge of the places that don't matter (and what to do about it). *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 11(1), 189–209. <https://doi.org/10.1093/cjres/rsx024>
- Salemink, K., Strijker, D., & Bosworth, G. (2017). Rural development in the digital age: A systematic literature review on unequal ICT availability, adoption, and use in rural areas. *Journal of Rural Studies*, 54, 360–371. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.06.018>
- Scoones, I. (2009). Livelihoods perspectives and rural development. *The Journal of Peasant Studies*, 36(1), 171–196. <https://doi.org/10.1080/03066150902820503>
- Woolcock, M. (1998). Social capital and economic development: Toward a theoretical synthesis and policy framework. *Theory and Society*, 27, 151–208. <https://doi.org/10.1023/A:1006884930135>

World Bank. (2026a, June 4). Perhutanan sosial di Indonesia: Memberdayakan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, dan melindungi hutan.

World Bank. (2026b, June 13). Indonesia's growth remains resilient, but productivity reforms are key to creating jobs and sustaining momentum.

Sumber Data dan Dokumen Kebijakan Daring

[Badan Pusat Statistik - Profil Kemiskinan September 2025](#)

[Badan Pusat Statistik - Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2026](#)

[World Bank - Indonesia Economic Prospects, June 2026](#)

[World Bank - Social Forestry in Indonesia, June 2026](#)

[Kementerian Desa PDT - Indeks Desa](#)